

Media
AUDIT  **R**
ISSN: 1411-7045 *Media Manajemen dan Pengawasan*

INSPEKTORAT JENDERAL SEBAGAI GARDA TERDEPAN

**MENJAGA PROFESIONALISME DAN INTEGRITAS KEMENTERIAN PERTANIAN
UNTUK TERWUJUDNYA SWASEMBADA PANGAN
MENUJU LUMBUNG PANGAN DUNIA 2045**

**Edisi 67
Desember
2024**





Selamat dan Sukses

Atas dilantiknnya
menjadi ketua **KPK RI**
periode 2024-2029

Komjen. Pol. Drs. Setyo Budiyanto,
S.H., M.H., CGCAE

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Bergerak Bertumbuh
untuk Kinerja
dan Produktivitas
Lebih Baik

PERAN INSPEKTORAT JENDERAL SEBAGAI GARDA TERDEPAN DALAM MENJAGA PROFESIONAL DAN INTEGRITAS KEMENTERIAN PERTANIAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) berperan penting dalam mencegah korupsi, meningkatkan profesionalitas dan menjaga integritas Sumber Daya Manusia (SDM) lingkup Kementerian Pertanian. Pentingnya peran APIP yang efektif mengawal pelayanan publik yang berintegritas. APIP harus memberikan keyakinan yang memadai dalam mencapai tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, memberikan peringatan dini (*early warning*) dan meningkatkan efektivitas penerapan manajemen risiko, serta memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi (Tusi) Kementerian Pertanian (Kementan).

Pelaksanaan tusi Inspektorat Jenderal dalam menjaga dan penegakan integritas serta meningkatkan profesionalisme SDM lingkup Kementan dilaksanakan melalui kegiatan pengawasan intern baik dalam perannya sebagai *quality assurance* maupun sebagai *consulting partner*. Peran assurance dilaksanakan melalui audit, reviu, pemantauan, dan evaluasi). Adapun peran consulting dilaksanakan melalui Sosialisasi, Internalisasi, Asistensi, konsultasi, Bimbingan teknis (Bimtek), pengawalan dan kegiatan pengawasan lainnya.

Untuk dapat mewujudkan program Kementan secara tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran, maka tema utama Media Auditor Edisi 67 tahun 2024 yaitu “ Inspektorat Jenderal sebagai Garda Terdepan Menjaga Profesionalisme dan Integritas Kementan untuk Mewujudkan Swasembada Pangan Menuju Lumbung Pangan Dunia 2024” dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Materi atau artikel yang disajikan dalam edisi ini merupakan *sharing knowledge* para auditor dalam upaya mewujudkan SDM yang berintegritas dan profesional. Pada menu wawasan menyajikan artikel para auditor dan pejabat fungsional tertentu terkait kebijakan pengawasan dan kebijakan lainnya yang ada di inspektorat Jenderal. Adapun untuk info media memuat kegiatan Inspektorat Jenderal selama bulan September s.d Desember 2024.

Dengan penuh kerendahan hati, kami senantiasa memohon masukan dan kritik yang membangun demi kemajuan Media Auditor Inspektorat Jenderal dalam memberikan informasi terbaik untuk membaca. Selamat membaca. Indrastari Sintia Laksmi- Pranata Humas Itjen

Media Auditor Edisi 67 Tahun 2024



Sumber: Canva

MEJA REDAKSI

3. Peran Inspektorat Jenderal Sebagai Garda Terdepan Dalam Menjaga Profesionalisme dan Integritas Kementerian Pertanian

EDITORIAL

6. masih kosong

MENU UTAMA

8. Peran Inspektorat Jenderal dalam Membentuk Integritas Sumber Daya Manusia Kementerian Pertanian
12. Membangun Nilai-Nilai Integritas: Perspektif Pengawasan Internal Pemerintah

WAWASAN

20. Gagal Merencanakan Lahan Hilang: Urgensi Survei Investigasi dan Desain Untuk Masa Depan
26. Literasi Digital Untuk Pertanian Maju: Kunci Sukses Swasembada Pangan
32. Pinjaman dan Hubah Luar Negeri Kementerian Pertanian 2025

- 36. Komunikasi dan Perilaku Kinerja Profesional Auditor Internal
- 44. Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru
- 48. Pentingnya Media Monitoring dalam Menyikapi Pemberitaan Terhadap Program Pemerintah

INFO MEDIA

- 54. Irjen Mentan Amran Terpilih Sebagai Ketua KPK
- 56. Itjen Kementan dan Itjen TNI AD Tindaklanjuti Hasil Pengawasan Wujudkawan Swasembada Pangan
- 58. Program Pompanisasi Jawa Barat Lampau Target Irjen Kementan: Kerja Bersama yang Patut Disyukuri
- 62. Sekretaris Itjen Kementan Ingatkan Semangat Memerangi Korupsi Secara Kontinyu
- 64. Dukung Program Ketahanan Pangan, Kementan Beri Bantuan Alat dan Benih Pertanian ke Polda Banten
- 66. Itjen Kementan Raih Dua Penghargaan PPID Kategori Badan Publik Informatif dan Komitmen Pimpinan Terbaik
- 68. Hari Sumpah Pemuda, Itjen Kementan Ajak Perangi Korupsi
- 70. Sekretaris Itjentan Tin Latifah: Selamat Kepada Irjen Setyo Budianto Terpilih Sebagai Ketua KPK
- 72. Menuju Amanah yang Mulia

INFO KESEHATAN

- 86. Pentingnya Mental Health Awarnes di Lingkungan Kerja

POJOK ANTI KORUPSI

- 78. Malaikat Pencatat Tak Tinggal Diam
- 79. Racun Itu Bernama Korupsi
- 80. Sajak Broker Banpem

Penerbit

Pelindung :
Inspektur Jenderal

Pembina
Sekretaris Itjen,
Inspektur I, Inspektur II.
Inspektur III, Inspektur IV.
Inspektur Investigasi

Penanggung jawab
Ketua Kelompok Humas dan Hukum

Wakil Penanggung jawab
Ketua Tim Humas

Pimpinan Redaksi
Heni Nugraha

Redaksi
Andri Cahyadi
Memet Darmawan
Nurul Nugrahaningrum
Widodo Teguh Santoso
Yulianto

Sekretaris Redaksi
Muhammad Havil

Penata Artistik
Fajar Adi Swastika

Photography
Muhamad Rizky Pradila

Humas dan Pencari Berita
Desy Permatasari

Administrasi Umum & Pendistribusian

Isti Susetiyo

ISSN
1411-7045

Kantor
Jl. Harsono RM No. 3
Gedung B Lt.II
Pasar Minggu, Jakarta 12550
Telp (021) 7800230 F(021) 7800220



Percepatan Swasembada Pangan dan Integritas yang Harus Dijaga

Oleh: Andri Cahyadi - Auditor Muda Inspektorat II

Presiden RI, Prabowo Subianto, usai mengucapkan sumpah sebagai presiden, menegaskan bahwa swasembada pangan menjadi salah satu prioritas yang akan dicapai. Indonesia harus mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan nasional secara mandiri.

Dengan penuh semangat, Presiden Prabowo memasang target swasembada pangan tercapai paling lambat pada tahun 2028-2029 atau jelang periode jabatannya berakhir “Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia,” ungkap Prabowo di Gedung Nusantara pada 20 Oktober 2024 yang lalu. Ketika memberikan sambutan pada forum KTT G20 Brasil, Presiden Prabowo menegaskan akan mengatasi kekurangan pangan dalam tiga tahun atau maju satu tahun lagi menjadi 2027. Menjawab tantangan tersebut Menteri

Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menargetkan produksi padi nasional mencapai 32 juta ton pada tahun 2025. Target itu untuk mendukung ketahanan dan swasembada pangan yang ditargetkan tercapai di 2027.

Target produksi padi di tahun 2025 tersebut, mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 30 juta ton. Upaya peningkatan produksi tersebut dilakukan juga dengan bersinergi dengan sejumlah lembaga untuk memperkuat ketahanan pangan Indonesia, apalagi target pemenuhan swasembada pangan tersebut di tengah ancaman perubahan iklim ekstrem. Kolaborasi ini mengubah lahan tidur menjadi lahan produktif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjaga stabilitas pangan nasional. Struktur anggaran Kementerian

Pertanian tahun 2025 difokuskan mendukung swasembada pangan khususnya produksi beras dengan alokasi anggaran sebesar Rp23,61 T yang dimanfaatkan untuk kegiatan Optimasi Lahan Rawa seluas 500 ribu ha, Cetak Sawah Rakyat (CSR) 225 ha, kegiatan pompanisasi lahan tadah hujan seluas 500 ribu ha, PATB padi gogo seluas 300 ha dan potensi tanam melalui perluasan area tanam/optimalisasi melalui Kemen PU seluas 300 ribu ha.

Blueprint swasembada pangan nasional mulai tahun 2024-2029 dengan upaya percepatan tercapainya target antara lain penyediaan benih unggul, ketersediaan pupuk, pompanisasi dan optimasi lahan dalam rangka pengingkatan indeks pertanaman. Selain itu, upaya-upaya penambahan luas lahan sawah terus dilakukan dengan cetak sawah seluas 3 juta ha, revitalisasi sistem irigasi pertanian sekira 61 bendungan, pelibatan petani milenial, dan transformasi dari pertanian tradisional menuju pertanian modern. Tentu saja selalu saja, rancangan dan niat baik selalu ada hantu yang berpotensi menjadi penyebab gagalnya rancangan yang disusun. Target swasembada pangan menjadi berantakan karena adanya musuh dalam selimut yang menggantung dalam lipatan. Hantu itu adalah lemahnya semangat dan rendahnya integritas.

Banyak literatur yang mendefinisikan nilai-nilai integritas dalam berbagai kajian, Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK menyimpulkan ada 9 (Sembilan) nilai-nilai integritas yang terkait langsung dengan prinsip-prinsip antikorupsi, yaitu Jujur, Tanggungjawab, Disiplin, Mandiri, Kerja Keras, Sederhana, Berani, Peduli, dan Adil. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 60 Tahun 2020 bahwa pembangunan integritas diukur dari sikap kejujuran, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kemampuan bekerja sama dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara.

Posisi sebagai APIP, kaitanya dengan integritas, dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan internal harus memberikan jaminan atas pelaksanaan kegiatan telah memenuhi kaidah-kaidah aturan yang ada, mengungkap fakta yang terjadi, dan memberikan solusi melalui rekomendasi jika terjadi penyimpangan untuk perbaikan sistem. Target swasembada pangan akan berjalan dengan baik-baik saja bila integritas para pelakunya terjaga dengan baik. Rendahnya integritas mengakibatkan kebiasaan korupsi seperti ikan yang pembusukannya dimulai dari kepala.

“Sekuat apa pun aturan, rancangan dan mekanisme hukum yang disusun akan menjadi sia-sia bila integritas tidak menjadi perhatian serius

Sebab itu, APIP yang secara kewenangan menjadi “mata dan telinga” pimpinan harus menjalankan tugas dan fungsinya dengan tepat. Karena kalau mencoba menjadi “busuk”, maka kebusukannya akan menular ke seluruh badan dan tujuan menjadi tidak tercapai.

PERAN INSPEKTORAT JENDERAL DALAM MEMBENTUK INTEGRITAS SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN PERTANIAN

Oleh: Rifki Ariefianto - Auditor Madya Inspektorat II

Integritas SDM Pertanian diperlukan untuk membangun, dan menjaga reputasi yang baik martabat dan bagi organisasi, menciptakan budaya organisasi yang baik melalui pengembangan kapabilitas karyawan/pegawai harus dilandasi dengan norma dan etika yang baik yang diawali dari keteladanan pimpinan. Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) berperan penting dalam mencegah korupsi dan meningkatkan integritas lingkup Kementan. Ruang lingkup kegiatan pengembangan kapabilitas dan kapasitas SDM seringkali hanya mentargetkan pejabat dan pegawai sebagai pelaksana program/kegiatan dan layanan Kementan yang berfokus pada akuntabilitas kinerja dan pencegahan korupsi.

Di sisi lain, integritas merupakan nilai karakter yang harus ditanamkan sejak dini. Selain itu, upaya penegakan integritas yang dilakukan seringkali hanya berupa pemberian punishment atas pelanggaran integritas yang dilakukan. Langkah-langkah strategis Inspektorat Jenderal dalam upaya membentuk integritas SDM Kementan antara lain melalui Pembangunan integritas pada calon-calon SDM Pertanian dan mewujudkan keseimbangan antara pemberian punishment

dan *reward* dalam upaya penegakan integritas. Integritas adalah konsisten berperilaku selaras dengan nilai, norma dan/atau etika organisasi, dan jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan, menciptakan budaya etika tinggi, bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan beserta risiko yang menyertainya (PermenPAN-RB Nomor 38 Tahun 2017). Integritas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai berupa faktor psikologis individu yang memiliki integritas tinggi antara fungsi jasmani dan rohaninya (Mangkunegaran, 2016).

“Integritas merupakan sesuatu yang menuntut seorang pegawai untuk bersikap jujur, berani, bijaksana dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugasnya.”

Semakin baik integritas seorang pegawai maka semakin baik pula kinerja yang dihasilkan. Integritas merupakan bentuk tanggung

jawab seseorang atas apa yang dilakukannya dan hasilnya sesuai dengan norma, nilai atau prinsip yang benar, dan pendirian yang teguh tanpa paksaan dari pihak manapun (Wetik, 2018).

Kementan sebagai sebuah organisasi, sangat memerlukan integritas SDM Pertanian sebagai upaya untuk membangun martabat dan menciptakan reputasi dan budaya yang baik bagi organisasi dengan mengembangkan karyawan/pegawai dengan etika yang baik.

Berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas Komisi Pemberantasan Korupsi (SPI-KPK) Tahun 2023, yang dilakukan penilaian persepsi terhadap 7 (tujuh) aspek meliputi: transparansi, integritas dalam pelaksanaan tugas, pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan SDM, trading in influence, pengelolaan anggaran dan sosialisasi antikorupsi, Kementerian Pertanian mendapat skor sebesar 66,79 dan masuk kategori 5 terendah dari 34 Kementerian.

Sulitnya membangun nilai-nilai integritas tentunya terkait dengan persoalan yang terstruktur secara budaya dalam masyarakat, termasuk yang paling dirasakan dalam masyarakat Indonesia. Bagaimana tidak, nilai-nilai integritas yang seharusnya dijalankan dalam suasana kebatinan masyarakat sehingga dapat terinternalisasikan, terinstitusionalisasikan, dan diaktualisasikan dalam kehidupan hanya diajarkan secara formalitas dalam setiap jenjang pendidikan tanpa menyentuh aspek konasi atau afeksi peserta didik, sehingga nilai-nilai integritas pada akhirnya hanya sarat teori namun miskin dalam aplikasi.

Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) berperan penting dalam mencegah korupsi dan meningkatkan

integritas lingkup Kementan. Pentingnya efektivitas peran APIP dalam mengawal pelayanan publik yang berintegritas. APIP harus memberikan keyakinan yang memadai dalam mencapai tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, memberikan peringatan dini (*early warning system*) dan meningkatkan efektivitas penerapan manajemen risiko dan membangun budaya peduli risiko, serta memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang baik (*Good Governance*) dan menciptakan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*).

Pelaksanaan tuis Inspektorat Jenderal dalam penegakan integritas lingkup Kementan telah dilaksanakan melalui kegiatan pengawasan baik dalam tusinya sebagai *quality assurance* maupun sebagai *consulting partner*. Ruang lingkup kegiatan seringkali hanya mentargetkan pejabat dan pegawai sebagai pelaksana program/kegiatan dan layanan Kementan dengan fokus pada transparansi, akuntabilitas dan pencegahan korupsi.

Di sisi lain, integritas merupakan nilai karakter yang harus ditanamkan sejak dini. Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) terus berupaya menanamkan nilai-nilai integritas secara formal dalam sistem pendidikan. Hal itu tercermin dari Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan untuk memotret kondisi integritas di lingkungan pendidikan seluruh Indonesia. Inspektorat Jenderal sebagai APIP hendaknya melakukan hal yang sejalan terutama terhadap Unit Pelaksana Teknis lingkup Kementerian Pertanian yang melaksanakan tuis pendidikan dan pelatihan.

Selain itu, upaya penegakan integritas yang dilakukan seringkali hanya berupa pemberian *punishment* atas pelanggaran integritas yang

dilakukan. Pelaksanaan tuisi *consulting* melalui sosialisasi juga lebih berfokus pada penanaman dampak/akibat yang akan didapatkan atas pelanggaran integritas. Di sisi lain, penerapan *reward* dan *punishment* itu seharusnya berjalan seimbang karena dapat menjadi motivasi bagi pegawai untuk menampilkan performa terbaik mereka. Ketika pegawai merasa dihargai atas usaha mereka, maka mereka cenderung merasa lebih termotivasi untuk bekerja lebih baik. Selain itu, *reward* juga berfungsi untuk memotivasi pegawai dalam mencapai target. Dengan adanya penghargaan yang spesifik, seperti bonus atau pengakuan, pegawai memiliki tujuan yang jelas untuk bekerja keras dan memberikan hasil maksimal. *Reward* juga membantu dalam mendorong budaya kerja yang positif. Lingkungan kerja yang menghargai pencapaian akan menciptakan rasa kebersamaan, kompetisi sehat, dan loyalitas terhadap institusi.

Berdasarkan beberapa permasalahan tersebut, maka Inspektorat Jenderal dapat menempuh langkah-langkah strategis dalam upaya membentuk integritas SDM Kementerian Pertanian antara lain:

1. Penanaman integritas pada calon-calon SDM Pertanian melalui:
 - a. Sosialisasi tentang pentingnya integritas melalui kuliah umum atau bimtek pada Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian yang melaksanakan tuisi pendidikan dan pelatihan lingkup Kementan.
 - b. Mengusulkan kurikulum pembangunan karakter berintegritas sebagai mata ajar pada pelaksanaan pendidikan dan pelatihan
2. Mewujudkan keseimbangan antara pemberian *punishment* dan *reward* dalam upaya penegakan integritas melalui:

- a. Usulan kebijakan pemberian *reward* yang seimbang sehingga dapat meningkatkan motivasi pegawai serta pejabat lingkup Kementan untuk selalu menegakkan integritas dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Pemberian *reward* dapat berupa *reward* finansial berupa: bonus, kenaikan gaji, insentif, atau tunjangan tambahan atau *reward* non-finansial berupa: pengakuan (misalnya, *Employee of the Month*), promosi, peluang pelatihan, atau fleksibilitas kerja.
- b. Pelaksanaan sosialisasi terhadap pentingnya keseimbangan *punishment* dan *reward* dalam penegakan integritas lingkup Kementan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Betri dan Ade. 2018. *Integritas Auditor Sebagai Pemoderasi : Pengaruh Kompetensi, Independensi, Kompleksitas Tugas dan Audit Time Budget Terhadap Kualitas Audit*. *Jurnal Balance*, Vol. XV, No. 1, Tahun 2018
2. <https://news.detik.com/berita/d-7162220/survei-penilaian-integritas-kpk-2023-skor-polri-meningkat>
3. <https://www.talenta.co/blog/reward-dan-punishment-karyawan/>
4. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekalongan/baca-artikel/16471/INTEGRITAS-TAMPAK-SULIT-Bukan-Berarti-TIDAK-MUNGKIN.html#:~:text=MANFAAT%20INTEGRITAS%20BAGI%20ORGANISASI&text=Menciptakan%20reputasi%20yang%20baik%20bagi,%2C%20transparan%2C%20dan%20bertanggung%20jawab.>
5. Mulyadi. (2013). *Auditing*. Jakarta: Salemba Empat

iNTEGRiTY





Membangun Nilai-Nilai Integritas: Perspektif Pengawasan Internal Pemerintah

Oleh : Suparmadi - Auditor Muda Inspektorat I

Menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, merupakan kalimat yang sering kita dengar sebagai slogan untuk meyakinkan suatu komitmen bersama dalam mencapai tujuan suatu organisasi. Kata integritas yang secara umum memiliki arti suatu sikap yang jujur dan kuat memegang prinsip-prinsip kebenaran. Integritas merupakan nilai-nilai dasar yang harus diterapkan pada setiap aparatur/penyelenggara negara, terlebih oleh para aparatur pengawas pemerintah, salah satunya Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). APIP diharapkan dapat menjamin independensi dan profesionalisme dalam menyampaikan fakta, informasi, membuat kesimpulan dan memberikan rekomendasi pada tugas-tugas pengawasan. Wardana dan Ariyanto (2016) mengatakan bahwa integritas adalah faktor yang mendasari kepercayaan publik dan patokan bagi auditor dalam mengambil perbedaan pendapat tanpa menerima kecurangan atau peniadaan prinsip.

Dalam mewujudkan *Good Governance dan clean government*, dibutuhkan upaya dan komitmen pemerintah untuk mewujudkannya adalah dengan menaruh perhatian terhadap kinerja penyelenggaraan organisasi pemerintah yang diperkuat melalui efektivitas sistem pengawasan internal. Sistem pengawasan internal pemerintah sangat lekat dengan APIP, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama/Inspektorat di setiap kementerian/lembaga, provinsi, dan kabupaten/kotamadya.

Tugas dan fungsi (Tusi) pengawasan APIP meliputi audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Tugas dan fungsi tersebut perlu dioptimalkan dan terus

dikembangkan sesuai kebutuhan organisasi, sehingga APIP perlu terus melakukan transformasi untuk memberikan nilai tambah pada (*Value Added*) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pengawasan Internal merupakan elemen yang penting dalam sistem pemerintahan, dengan pengawasan internal yang efektif maka dapat memberikan penjaminan (*assurance*) bahwa kebijakan, program/kegiatan dan layanan telah dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga di dalam struktur pemerintahan itu sendiri, dimana tujuannya untuk memastikan semua kegiatan dan prosesnya berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Secara umum tujuan pengawasan internal adalah : 1) meningkatkan efektif, efisien, ekonomis dan taat aturan, 2) pencegahan korupsi, 3) meastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan mendukung pengambil keputusan. Seluruh tujuan pengawasan internal tidak akan terwujud jika mengesampingkan nilai-nilai integritas, karena nilai-nilai integritas yang akan menjadi rambu-rambu pada setia tahap dan langkah tugas-tugas pengawasan.

Fungsi Pengawasan Internal

“Mencegah lebih baik daripada mengobati” adalah peribahasa yang sering kita dengar dalam kaitannya dengan bidang kesehatan, namun, prinsip tersebut dapat diterapkan dalam manajemen pengawasan internal pemerintahan, yaitu lebih mengutamakan pencegahan dari pada penindakan, sehingga hal ini menjadi salah satu peran strategis dari

pengawas internal/APIP, yang sejalan dengan paradigma APIP yang terus berkembang dalam menunjang dan memperkuat efektivitas sistem pengendalian intern guna mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Sejalan dengan perubahan paradigma tersebut, cara pandang lama sebagai *watchdog* yang identik dengan pencari kesalahan, terus bergeser dimana APIP berperan sebagai *early warning system*, harapannya dapat memberikan peringatan dini (tindakan preventif) dengan tidak meninggalkan tindakan represif dan educative dengan memberikan rekomendasi yang menghasikan perbaikan sistem. Selain itu APIP dituntut mampu melakukan penjaminan kualitas (*quality assurance*), yaitu diharapkan dapat memberikan bimbingan terhadap pengendalian risiko, sehingga program/kegiatan dan layanan yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai tujuan. Dalam hal ini APIP diharapkan mampu dan turut berperan secara aktif dan menjadi bagian dari penyelesaian masalah.

Disamping menjalankan peran *assurance* dan *consulting*, APIP diharapkan dapat berperan sebagai mitra strategis (*strategic partner*) yang membantu pimpinan dan jajaran manajemen dalam menyelesaikan berbagai masalah penyelenggaraan pemerintahan, dan tentu saja tetap dalam koridor dan aturan sesuai dengan standar dan kode etik audit/pengawasan. Ruang lingkup pengawasan APIP yang sangat luas dan sangat memahami proses bisnis pada organisasi masing-masing memungkinkan APIP dapat merencanakan pola pengawasan yang lebih efektif dengan mengidentifikasi lebih awal potensi-potensi risiko yang kemungkinan terjadi dan dapat menjadi penghambat atau bahkan menggagalkan tujuan program.kegiatan.

Nilai- Nilai Integritas

Banyak literatur yang mendefinisikan nilai-nilai integritas dalam berbagai kajian, Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK menyimpulkan ada 9 (Sembilan) nilai – nilai integritas yang terkait langsung dengan prinsip-prinsip antikorupsi yaitu;

- 1. Jujur**
- 2. Tanggungjawab**
- 3. Disiplin**
- 4. Mandiri**
- 5. Kerja Keras**
- 6. Sederhana**
- 7. Berani**
- 8. Peduli**
- 9. Adil**

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pembangunan Integritas Pegawai Aparatur Sipil Negara menjelaskan bahwa pembangunan integritas diukur dari sikap kejujuran, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kemampuan bekerja sama dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara.

Nilai -nilai tersebut sangat relevan diterapkan pada aparat pengawas internal dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan, sesuai dengan PP 60 tahun 2008 tentang SPIP Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang

memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan. Pada prinsipnya tujuan pengawasan intern memastikan bahwa seluruh kegiatan/program yang dilaksanakan oleh satker pemerintah telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien, sehingga untuk mewujudkan tujuan tersebut nilai-nilai integritas menjadi dasar utama dalam pelaksanaannya, yang harus diterapkan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Kita akan mencoba menguraikan beberapa nilai-nilai integritas tersebut dalam kaitannya tugas-tugas pengawasan intern.

Contoh yang pertama dari nilai integritas adalah sikap “jujur”, nilai ini yang paling sering disebutkan jika dikaitkan dengan kata integritas, karena nilai jujur merupakan nilai yang paling fundamental dalam setiap menjalankan amanah bagi setiap aparatur negara. Output dari aparat pengawas internal adalah simpulan hasil audit dan rekomendasi. Kejujuran dalam mengungkapkan kondisi, mencari penyebab yang hakiki, dan melakukan analisa terhadap akibat/dampak yang ditimbulkan dengan berdasarkan aturan-aturan yang ada, akan memberikan berdampak pada kesimpulan dan rekomendasi yang diberikan, sehingga dengan rekomendasi tersebut akan menjadi nilai tambah bagi instansi/obyek pemeriksaan. Apa akibat jika sikap jujur tercederai pada saat pelaksanaan audit internal?, tentu saja akan berakibat buruk pada keberlangsungan organisasi, dengan ketidakjujuran dalam mengungkapkan fakta maka akan mudah dipengaruhi dengan berbagai “iming -iming” yang meggiurkan,

kesimpulan yang dihasilkan akan memberikan kesimpulan yang berpotensi menyesatkan, dan penyebab yang disampaikan akan menjadi penyebab yang semu dan meragukan, sehingga rekomendasi yang dihasilkan tidak akan memberikan nilai tambah, tetapi bahkan akan memperburuk keberlangsungan organisasi.

Yang kedua nilai integritas “Berani”, jika dikaitkan dengan tugas pengawasan internal, sikap berani artinya berani mengungkapkan kebenaran sesuai dengan fakta dan data yang ada, serta melakukan analisa dengan peraturan-peraturan yang berlaku, selain itu dengan sikap berani maka tidak mudah untuk diintervensi oleh siapapun. Sikap berani tentu saja harus didasari adanya komitmen yang kuat, dan jauh dari perilaku-perilaku koruptif, karena jika masih bergelut dengan perilaku-perilaku yang koruptif niscaya akan memiliki sikap berani. Keberanian dalam mengungkapkan data dan fakta tentu saja harus didukung dengan analisa kuat yang didasarkan pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Yang ketiga nilai integritas “tanggungjawab”, dalam melakukan tugas-tugas audit internal tidak akan terlepas dari kode etik dan standar audit/pengawasan, auditor akan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan audit/pengawasan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dengan berpegangan pada kode etik dan standar audit. Bertanggungjawab dalam pelaksanaan pengawasan internal tidak hanya pada proses, tetapi juga kepada hasil dan tindaklanjutnya, sehingga auditor tidak akan selesai pada output rekomendasi, tetapi juga akan bertanggungjawab terhadap bagaimana rekomendasi tersebut ditindaklanjuti dan dapat menjadikan perbaikan yang konstruktif.

Yang keempat nilai integritas “sederhana”, nilai integritas ini tidak berdampak secara langsung tetapi lebih kepada memberikan contoh/tauladan kepada masyarakat, tentu saja sikap sederhana tidak hanya berlaku pada aparat pengawasan internal saja, tetapi juga pada seluruh aparatur pemerintah dan penyelenggaraan negara perlu memberikan contoh sikap hidup yang sederhana.

‘Hidup sederhana adalah sebuah gaya hidup saat seseorang mengutamakan hal-hal yang esensial dan menghindari kemewahan yang berlebihan’

Hal Ini tidak berarti hidup dalam kemiskinan atau kesulitan, melainkan mengambil keputusan bijak dalam pengeluaran, menghargai sumber daya alam, dan menekankan nilai-nilai yang lebih abadi, pada prinsipnya hidup sederhana adalah gaya hidup saat seseorang berusaha untuk memusatkan perhatian pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidupnya. Aparatur negara akan menjadi perhatian publik dalam bersikap, berperilaku dan bergaya hidup, gaya hidup yang penuh dengan hedonisme bagi aparatur negara akan menebar banyak fitnah dan prasangka buruk di kalangan masyarakat, dan akan beranggapan harta yang dipakai adalah hasil korupsi.

Kenapa Nilai Integritas harus diterapkan dalam tugas pengawasan Internal?

Dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan internal pada prinsipnya adalah memberikan jaminan atas pelaksanaan kegiatan telah memenuhi kaidah-kaidah aturan yang

ada, mengungkap fakta yang terjadi, dan memberikan solusi melalui rekomendasi yang konstruktif jika terjadi penyimpangan, tentu saja tujuannya untuk perbaikan sistem.

Integritas memiliki peran penting dalam pelaksanaan pengawasan internal, baik terkait personal, Tim Audit, maupun Instansi. Dengan adanya integritas, baik secara personal atau lembaga dapat dipercaya, dihormati, dan dihargai oleh siapapun. Integritas juga membangun reputasi yang baik, menciptakan lingkungan kerja yang sehat, dan meningkatkan kepercayaan dalam hubungan antar individu dan antar lembaga. Fungsi pengawas internal pada hakikatnya juga membangun kepercayaan/trust. Sekali diciderai oleh perilaku-perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai integritas, maka baik Auditor sebagai personal atau APIP sebagai kelembagaan tidak akan dipercaya dan lambat laun akan ditinggalkan.

Untuk itu, nilai-nilai integritas bukan menjadi pilihan, tetapi harus dikembangkan dan dijaga dengan sungguh-sungguh, sehingga perlu komitmen semua pihak, baik dari level pucuk pimpinan sampai tingkat bawah.

Internalisasi nilai-nilai integritas dalam tugas pengawasan Internal

“Barangsiapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya.” (HR. Muslim).

Dalil tersebut menempatkan bahwa saling mengingatkan pada jalan kebenaran adalah

menjadi hal yang utama dan bernilai tinggi. Dalam setiap pelaksanaan tugas-tugas pengawasan yang dilaksanakan dalam bentuk Tim, diperlukan persepsi dan komitmen yang sama untuk membangun kepercayaan pada dalam tim. Budaya saling mengingatkan perlu di terapkan, dan akan lebih efektif, karena dari setiap individu personil yang mengingatkan pada personal lainnya, minimal akan ada 2 personal yang akan mempertimbangkan jika melakukan hal- hal yang dilarang, yaitu selain bagi yang diingatkan, tetapi juga bagi personil yang mengingatkan.

Upaya saling mengingatkan untuk berbuat sesuai nilai-nilai integritas menjadi bentuk internalisasi yang efektif. Selain itu internalisasi yang dilakukan adalah dengan membangun sistem yang dapat membatasi ruang gerak untuk melakukan hal-hal/ perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai integritas. Penerapan kode etik yang ketat dan dengan berbagai ruang pengaduan masyarakat yang dibuka secara transparan serta dijamin tindaklanjutnya akan memberikan dampak pada sikap kehati-hatian pada setiap aparat pengawas internal, pada awalnya akan menjadi sebuah keterpaksaan, tetapi berjalannya waktu diharapkan akan menjadi habits yang positif dalam menunjang kinerja sebagai aparat pengawasan internal.

Menjaga Integritas

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan skor hasil survey penilaian integritas (SPI) nasional tahun 2023 berada pada angka 71 atau masuk dalam rentan korupsi. Skor tersebut jauh dari yang ditargetkan yaitu nilai 74, dan turun dibanding skor tahun 2022 yaitu 71,94. Hal tersebut membuktikan bahwa menjaga dan mempertahankan jauh lebih sulit dibanding

meraihnya. Menurunnya skor integritas secara nasional menunjukkan bahwa menjaga dan mengembangkan nilai-nilai integritas harus menjadi prioritas, terutama dalam mendukung independensi dan profesionalitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBK/WBBM) di Instansi Pemerintah, bahwa Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) ditunjuk sebagai penilai dan asistensi pada komponen pembangunan Zona Integritas. Peran itu sangat vital untuk melakukan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas yang dilakukan oleh Unit kerja pemerintah, fungsi tersebut merupakan salah satu menjaga integritas di lingkup pemerintahan, semakin banyak unit kerja yang mendapat predikat Zona Integritas maka akan berdampak pada meningkatnya nilai-nilai integritas secara nasional.

Upaya lain yang dapat menjaga integritas agar tetap menjadi nilai-nilai yang terus digunakan dan menjadi budaya yaitu dengan penindakan yang tegas. Penindakan adalah merupakan salah satu sistem pencegahan yang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

1. Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK : <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220517-memahami-9-nilai-prinsip-antikorupsi>
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pembangunan Integritas Pegawai Aparatur Sipil Negara
3. PP 60 tahun 2008 tentang SPIP Pengawasan Intern
4. Kompas.com dengan judul “Skor Integritas Nasional 2023 Turun, Indonesia Dinilai Rentan Korupsi “, Klik untuk baca: <https://nasional.kompas.com/read/2024/01/27/06582251/skor-integritas-nasional-2023-turun-indonesia-dinilai-rentan-korupsi>.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah



Gagal Merencanakan, Lahan Hilang: Urgensi Survei Investigasi dan Desain Untuk Masa Depan Pangan

Oleh: Suhardi - Auditor Madya Inspektorat III

Kegiatan Cetak Sawah dan Optimasi Lahan (oplah) telah dicanangkan Menteri Pertanian untuk mewujudkan swasembada pangan yang berfokus pada daerah strategis. Tujuan kegiatan Cetak Sawah dan Optimasi Lahan yaitu untuk mengatasi alih fungsi lahan dan menjaga ketahanan pangan nasional, kegiatan ini mendukung visi Indonesia sebagai negara berdaulat pangan sekaligus menjadi lumbung pangan dunia. Target kegiatan Cetak Sawah sampai akhir tahun 2029 sebesar 3 juta hektar yang diawali pada tahun 2024 dengan pembukaan lahan untuk sawah di Kabupaten Merauke. Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan dalam rangka mewujudkan kemandirian, kedaulatan dan ketahanan pangan nasional, maka upaya untuk memperluas baku lahan sawah menjadi sangat penting. Anggaran Kementerian Pertanian tahun 2025 sebesar Rp15 triliun diantaranya digunakan untuk kegiatan Cetak Sawah dan akan meningkat pada tahun berikutnya. Komitmen dan tekad Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk mewujudkan

swasembada beras perlu dukungan penuh dari stake holder dan tentunya seluruh unsur lingkup Kementerian Pertanian. Belajar dari pengalaman kegiatan Cetak Sawah sebelumnya terdapat lahan yang tidak dapat dilakukan penanaman dan bahkan gagal keberlanjutan usaha budidaya tanaman padi. Kegagalan tersebut disebabkan antara lain: (1) Lahan yang dipilih tidak terdapat sumber air; (2) sistem irigasi dan drainase dirancang tidak optimal sehingga menyebabkan genangan berlebih atau waterlogging; (3) Infrastruktur seperti jalan usaha tani, pematang sawah, dan saluran gagal berfungsi; (4) Lokasi yang dipilih tanpa persetujuan masyarakat atau adat sehingga memicu konflik sosial; dan (5) Salah perencanaan yang menyebabkan erosi, salinisasi, atau pengasaman tanah. Hal tersebut dapat dihindari apabila identifikasi dan verifikasi calon petani calon lokasi (CPCL) serta Survei Investigasi dan Desain (SID) dilaksanakan secara cermat dan memadai serta dilaksanakan evaluasi atas hasil SID oleh pihak *independent* dan memiliki kompetensi.

Pendahuluan

Proyek Pengembangan Lahan Gambut (PLG) satu juta hektar di Kalimantan Tengah diluncurkan pada tahun 1995 sesuai Keputusan Presiden nomor 82 pada 26 Desember 1995. Proyek lahan gambut satu juta hektar sebagai bagian dari tekad yang kuat untuk mencapai kembali posisi swasembada beras, namun proyek tersebut berakhir dengan kegagalan karena lahan gambut terbukti tidak cocok untuk penanaman padi.

Cetak sawah adalah suatu usaha penambahan luas baku lahan sawah (sawah baru) pada berbagai tipologi lahan yang belum pernah diusahakan/lahan terlantar/bera (minimal 3 tahun) untuk pertanian dengan sistem sawah (Draf Petunjuk Teknis SID Dalam Rangka Pelaksanaan Cetak Sawah TA 2025). Tujuan kegiatan cetak sawah yaitu menambah luas baku lahan sawah (*output*) dan menghasilkan produksi utamanya padi pada areal sawah baru (*outcome*). Sasaran kegiatan Cetak Sawah tahun 2025 seluas 150 ribu hektar seperti yang dikatakan Menteri Pertanian saat rapat bersama Komisi IV di Gedung DPR RI pada hari Selasa, 5 November 2024. Target produksi beras pada 2025 diharapkan dapat mencapai angka 32,83 juta ton dan target produksi jagung capai 16,68 ton.

Kementerian Pertanian telah melaksanakan kegiatan Cetak Sawah sejak tahun 2012, namun hingga saat ini belum diketahui seberapa luas sawah yang telah dicetak dapat berkontribusi memproduksi beras. Permasalahan kegiatan Cetak Sawah dan Optimasi Lahan yang ditemukan pada pelaksanaan audit maupun pengawasan antara lain yaitu lahan yang dilakukan konstruksi tidak dapat diolah dan ditanami karena tidak terdapat sumber

air hingga pada akhirnya sawah dibiarkan dan ditumbuhi semak-semak, gulma, atau tanaman liar kembali. Hasil penelitian pada kegiatan Cetak Sawah Tahun Anggaran (TA) 2016 di Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan seluas 1.003 ha oleh Mahasiswa Program Studi Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Institut Pertanian Bogor Tahun 2019 menyimpulkan kemungkinan besar tidak berlanjut. Hal tersebut disebabkan: (1) lokasi cetak sawah sangat jauh dari pusat kota kabupaten dan tidak ada akses transportasi darat; (2) jaringan irigasi tanpa pintu air; (3) alat dan mesin pertanian tidak mencukupi kebutuhan petani; (4) ketiadaan lembaga keuangan sebagai penyedia modal usaha tani; (5) keterampilan petani dalam mengolah lahan masih sangat terbatas.

Tahun 2016 realisasi cetak sawah mencapai 96,27% dari target 134 ribu ha atau setara dengan 129 ribu ha lahan. Kendala terbesar pada SID yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah sebelum meminta dilakukannya cetak sawah oleh pemerintah pusat, karena SID yang diajukan tidak cocok dengan kondisi di lapangan. Terbatasnya ahli desain perluasan lahan hingga terbatasnya petugas yang mengerti desain cetak sawah mengakibatkan SID yang dibuat tidak cocok dengan kondisi lapangan, seperti yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian kepada Tabloid Sinar Tani 2017. Rencana besar untuk kembali melaksanakan kegiatan Cetak Sawah dan Optimasi Lahan demi swasembada pangan perlu persiapan dan perencanaan secara cermat dalam melakukan identifikasi, survei maupun investigasi sehingga simpulan kelayakan menjadi tepat untuk menentukan langkah

diteruskan atau tidak diteruskan pada tahap desain dan konstruksi “*Failing to plan is planning to fail*”. Lahan yang benar-benar layak dapat dilanjutkan pada tahap desain dan konstruksi sehingga terjamin secara berkelanjutan lahan dapat diolah dan ditanami guna meningkatkan produksi padi serta swasembada pangan yang kita inginkan.

Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan Cetak Sawah dalam rangka menambah luasan baku lahan sawah mengacu pada Petunjuk Teknis (Juknis) Cetak Sawah TA 2025 telah disusun oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP). Kegiatan cetak sawah merupakan strategi dan terobosan yang tepat untuk mewujudkan ketersediaan pangan nasional yang cukup. Seiring dengan dinamika pertumbuhan pembangunan pada segala bidang terutama industri dan pemukiman sangat berpengaruh negatif terhadap pengembangan sektor pertanian khususnya produksi padi, karena menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian khususnya lahan sawah menjadi lahan non pertanian atau alih komoditas selain padi. Hal ini akan mengancam kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan dalam rangka mewujudkan kemandirian, kedaulatan dan ketahanan pangan nasional, maka upaya untuk memperluas baku lahan sawah menjadi sangat penting.

Kegiatan Cetak Sawah dan Optimasi Lahan sama-sama diawali dengan adanya kegiatan identifikasi CPCL serta dilanjutkan pada kegiatan survei, investigasi dan desain. Identifikasi CPCL dilaksanakan oleh Dinas Kabupaten/Kota untuk menentukan calon petani dan calon lokasi yang secara umum

memenuhi persyaratan cetak sawah dan oplah rawa untuk dapat dilanjutkan secara mendalam pada kegiatan survei dan investigasi. Kegiatan survei dan investigasi akan menyimpulkan kelayakan lahan untuk dapat dilakukan desain dan konstruksi, bisa jadi lahan yang telah diidentifikasi dan diverifikasi disimpulkan tidak layak untuk dilakukan desain dan konstruksi. Sebaliknya apabila hasil survei dan investigasi dengan kesimpulan layak maka dapat dilanjutkan pada tahap berikutnya yaitu desain dan penyusunan rencana anggaran biaya (RAB) serta konstruksi. Sering terjadi tahapan identifikasi dan verifikasi CPCL serta SID dilaksanakan kurang memadai dan kurang cermat karena hanya berorientasi merealisasikan target yang telah dibebankan baik oleh Dinas Kabupaten/Provinsi maupun oleh Kementerian Pertanian.

Titik kritis penyusunan SID cetak sawah maupun oplah rawa seperti yang disampaikan oleh Direktur Perlindungan dan Penyediaan Lahan saat focus group discussion (FGD) Hasil Audit Oplah Rawa di Yogyakarta 21 November 2024 yaitu:

1. Desain hasil SID tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan;
2. Penggunaan satuan volume dan pembobotan pekerjaan yang tidak seragam;
3. Belum tersusunnya database spasial yang dilengkapi dengan atribut nama poktan, ketua poktan, desa, kecamatan dan kabupaten sesuai dengan yang tercantum dalam Pedoman Umum SID.

Namun sesungguhnya banyak hal terjadi yang menjadikan SID tidak dapat digunakan sebagai acuan pelaksanaan konstruksi atau dapat digunakan sebagai acuan konstruksi,

namun tidak ada keberlanjutan usaha budidaya tanaman padi pada lahan yang telah dicetak. Beberapa hal tersebut antara lain, yaitu:

1. Data derajat kemiringan lahan pada pemetaan topografi menggunakan teknologi drone tidak akurat;
2. Ketersediaan air berdasarkan aliran sungai dan curah hujan tahunan dinyatakan mencukupi, namun sesungguhnya tidak mencukupi selama musim kemarau;
3. Hasil analisis tanah pada beberapa area memiliki kadar pirit tinggi yang berisiko meracuni tanaman padi, namun dinyatakan sesuai untuk sawah dengan potentia Hydrogenii (pH) 5,5-6,5 dengan tekstur liat berpasir;
4. Rencana saluran irigasi direncanakan mengikuti pola gravitasi untuk efisien biaya, namun tidak memperhitungkan elevasi yang menghalangi aliran air secara alami di beberapa area;
5. Tidak terdapat analisis dampak lingkungan (AMDAL) dan penilaian risiko genangan permanen di area tertentu serta kehilangan habitat lokal seperti hutan atau keanekaragaman hayati (biodiversitas);
6. Tidak ada keterlibatan masyarakat setempat dalam survei awal;
7. Desain petakan lahan, saluran irigasi dan drainase serta kebutuhan alsintan seperti pompa tidak sesuai dengan lokasi lahan yang berkontur. Lokasi Oplah rawa di Kab. Aceh Utara kering tidak ada air,

namun banjir saat hujan karena lokasi lahan berada pada daerah cekungan yang membutuhkan pekerjaan rehabilitasi konstruksi saluran primer dan sekunder terlebih dahulu;

8. Analisis biaya tidak realistis dan atau cenderung memaksimalkan pagu anggaran;
9. Tidak terdapat kesimpulan kelayakan atau ketidaklayakan pada hasil SID. Seharusnya sesuai draft Juknis SID Dalam Rangka Pelaksanaan Cetak Sawah TA 2025 bahwa survei/investigasi adalah serangkaian kegiatan identifikasi dan penelitian pada calon petani dan calon lokasi (CPCL) cetak sawah yang bertujuan untuk memperoleh calon petani dan calon lokasi yang layak.

SID dikatakan memadai dan dapat digunakan sebagai acuan pelaksanaan konstruksi studinya memenuhi kriteria:

1. Komprehensif, yaitu meliputi semua aspek teknis, sosial, ekonomis, dan lingkungan;
2. Akurat, yaitu menggunakan metode dan teknologi yang dapat memastikan oresis data;
3. Feasible, yaitu rencana yang dihasilkan dapat diimplementasikan sesuai anggaran dan waktu;
4. Berbasis Partisipasi, melibatkan masyarakat lokal dan pemangku kepentingan secara aktif;
5. Berorientasi Keberlanjutan, Memastikan keberlanjutan ekologis dan ekonomi jangka Panjang.

Simpulan dan Rekomendasi

Penyusunan SID sebagai langkah awal dalam proses kegiatan Cetak Sawah dan Optimasi Lahan menjadi tahapan kritis dalam mencapai tujuan kegiatan menambah produksi padi. Evaluasi terhadap hasil SID sebelum digunakan sebagai acuan pelaksanaan konstruksi menjadi kebutuhan penting yang harus dilaksanakan seperti yang diamanahkan dalam Juknis SID Dalam Rangka Pelaksanaan Cetak Sawah 2025. Evaluasi SID tidak hanya dilaksanakan oleh personil atau Tim Pusat/Provinsi/Kabupaten, namun juga harus menyertakan pihak lain yang independent dan memiliki kompetensi seperti akademisi/peneliti. Independensi dan kompetensi evaluator dalam mengevaluasi hasil SID Cetak Sawah dan Optimasi Lahan adalah aspek penting untuk memastikan penilaian yang obyektif, akurat, dan dapat diandalkan. Independensi evaluator memiliki makna tidak memiliki konflik kepentingan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam SID dan penilaian didasarkan pada data dan analisis, bukan pada opini pribadi atau tekanan eksternal. Evaluator bertanggungjawab atas laporan dan hasil evaluasi yang disusun, memastikan transparansi dalam metode dan temuan.

Kompetensi evaluator mengacu pada kemampuan teknis berupa: (1) penguasaan ilmu geospasial; (2) keahlian dalam agronomi dan tanah; (3) teknik hidrologi dan irigasi; (4) analisis data kuantitatif dan kualitatif; (5) penguasaan teknologi modern. Selain kemampuan teknis juga memiliki kemampuan non teknis berupa: (1) ketrampilan komunikasi; (2) ketrampilan manajerial; (3) pemahaman regulasi dan kebijakan; (4) etika professional.

Kombinasi independensi dan kompetensi evaluator yang memadai diharapkan mampu:

1. Mengidentifikasi kesalahan atau kekurangan dalam hasil SID;
2. Memberikan rekomendasi yang relevan berdasarkan data yang terpercaya;
3. Membangun kepercayaan dari pihak-pihak yang berkepentingan melalui proses evaluasi yang transparan dan obyektif.

Agar SID dapat digunakan sebagai dasar yang kuat untuk pelaksanaan konstruksi Cetak Sawah atau Optimasi Lahan sehingga kegiatan/program dapat berjalan secara efektif dan efisien, maka perlu metodologi evaluasi yang tepat dengan tahapan:

1. Perencanaan evaluasi.
 - a. Menilai akurasi data spasial (peta, elevasi, saluran irigasi);
 - b. Menilai kelengkapan teknis (analisis tanah, air, topografi);
 - c. Menilai relevansi desain teknis dengan kondisi aktual;
 - d. Mengidentifikasi potensi dan kendala dari hasil SID.
2. Pengumpulan data evaluasi.
 - a. Mengumpulkan data primer dengan melaksanakan verifikasi lapangan terhadap data yang dihasilkan oleh SID seperti luas lahan potensial, kondisi irigasi dan drainase, serta kesuburan tanah (hasil analisis laboratorium). Selanjutnya melaksanakan wawancara dengan Tim Pelaksana SID dan pihak terkait;
 - b. Mengumpulkan data sekunder berupa dokumen laporan SID, peta topografi dan spasial hasil survei, serta data historis terkait lahan dan irigasi.

3. Metode analisis data.
 - a. Analisis kuantitatif dengan membandingkan peta hasil SID dengan data referensi peta nasional dan peta satelit, serta menilai tingkat kesesuaian tata guna lahan. Analisis kesesuaian lahan dapat menggunakan metode scoring atau *overlay* dalam *Geographic Information System (GIS)* untuk menilai kesesuaian lahan terhadap kriteria teknis;
 - b. Analisis kualitatif dengan meninjau kesesuaian desain teknis irigasi, pematang lahan, dan aksesibilitas terhadap kondisi lapangan. Selain itu, juga melaksanakan penilaian terhadap pemahaman dan penerimaan hasil SID oleh pemangku kepentingan.
4. Evaluasi kinerja SID.

Melaksanakan evaluasi dengan parameter:

 - a. Tingkat kualitas atau akurasi data survei topografi, hidrologi, dan tanah;
 - b. Tingkat kesesuaian desain berupa efisiensi dan relevansi desain teknis dengan kondisi aktual;
 - c. Dampak sosial dengan penilaian proyeksi hasil dari cetak sawah berdasarkan rekomendasi SID;
 - d. Penilaian terhadap efisiensi proses dari waktu dan biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan survei dan desain.
5. Penyusunan rekomendasi.

Perbaiki hasil SID dengan melaksanakan revisi atau pembaruan pada data yang tidak akurat atau tidak lengkap.
6. Pelaporan dan tindak lanjut.
 - a. Laporan evaluasi yang mencakup temuan, analisis, dan rekomendasi;
 - b. Sosialisasi dan koordinasi dengan diskusi

- hasil evaluasi Bersama Tim Teknis, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lain;
- c. Merencanakan implementasi dengan penyusunan strategi pelaksanaan kegiatan Cetak Sawah dan Optimasi Lahan berdasarkan hasil evaluasi SID.

Daftar Pustaka

1. *Draf Petunjuk Teknis Cetak Sawah Tahun Anggaran 2025*;
2. *Draf Petunjuk Teknis Survei Investigasi dan Desain Dalam Rangka Pelaksanaan Cetak Sawah Tahun Anggaran 2025*;
3. *Petunjuk Teknis Optimasi Lahan Rawa TA 2024*;
4. *Laporan Pengawasan Oplah Rawa pada Kab. Aceh Utara Tahun 2024*;
5. *Dampak dan Keberlanjutan Program Cetak Sawah di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah (Program Studi Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Institut Pertanian Bogor, 2019)*;
6. *SID Syarat Mutlak Cetak Sawah (Tabloid Sinar Tani, 2017)*;
7. *Focus group discussion (FGD) Hasil Audit Oplah Rawa di Yogyakarta 21 November 2024*;
8. https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Proyek_lahan_gambut_satu_juta_hektar;
9. https://www.antarane.ws.com/berita/4429797/urgensi-pencetakan-sawah-berkualitas#google_vignette;

WAWASAN



Sumber: Canva

LITERASI DIGITAL UNTUK PERTANIAN MAJU: KUNCI SUKSES SWASEMBADA PANGAN

Di era digital, kemampuan petani untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi bukan lagi sekadar pilihan, tetapi kebutuhan mendesak. Literasi digital menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan global di sektor pertanian, terutama bagi Indonesia yang menargetkan swasembada pangan dan lumbung pangan dunia pada tahun 2045. Namun, seberapa besar peran literasi digital untuk mewujudkan pertanian maju dan ketahanan pangan nasional?

Oleh: Ceria Isra Ningtyas
Pustakawan, Sekretariat Jenderal

Indonesia adalah negara agraris dengan sektor pertanian yang memiliki peran vital dalam perekonomian nasional. Kebutuhan pangan terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk memicu pemerintah untuk memantapkan target swasembada pangan. Salah satu upaya penting dalam mencapainya adalah melalui penerapan literasi digital di kalangan petani. Literasi digital tidak hanya berarti memahami teknologi dasar, tetapi juga mampu menggunakan informasi digital untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan usaha tani. Kemajuan teknologi pertanian modern, seperti aplikasi cuaca, perangkat pengelolaan lahan berbasis *Global Positioning System (GPS)*, hingga pasar digital untuk menjual hasil tani, memerlukan keterampilan digital dasar bagi para petani. Namun, kenyataannya petani di Indonesia memiliki keterbatasan dalam literasi digital.

Penelitian menunjukkan bahwa kesenjangan digital di kalangan petani dan nelayan ditandai dengan ketidakmampuan mereka untuk mengakses dan menggunakan informasi daring melalui teknologi informasi dan komunikasi (Masyhur, 2016). Sebuah studi tentang kelompok tani di Gunung Kidul, Yogyakarta, mengungkapkan kurangnya pemahaman tentang konsep literasi digital dan penggunaan media digital yang kurang optimal (Makin & Waningrum, 2023). Temuan-temuan ini menyoroti perlunya intervensi yang ditargetkan untuk meningkatkan literasi digital di kalangan petani Indonesia.

Meskipun potensinya besar, penerapan literasi digital di sektor pertanian masih menghadapi berbagai tantangan. Berikut adalah beberapa pertanyaan penting yang perlu dijawab, yaitu (1) Mengapa literasi digital menjadi kunci untuk mencapai swasembada pangan di Indonesia? (2) Bagaimana tingkat literasi

digital petani di Indonesia saat ini? (3) Apa saja hambatan yang dihadapi dalam mengimplementasikan literasi digital di sektor pertanian?, dan (4) Langkah-langkah apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan literasi digital di kalangan petani? Pertanyaan-pertanyaan ini memberikan gambaran tentang isu-isu yang perlu diperhatikan dalam upaya mewujudkan pertanian maju berbasis digital di Indonesia.

Tantangan penerapan literasi digital di kalangan petani literasi digital adalah kemampuan individu dalam mengakses, memahami, dan memanfaatkan informasi digital. Dalam konteks pertanian, literasi digital memungkinkan petani mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan. Sebuah studi di Kabupaten Tambrauw Papua Barat (Sangadji et al., 2024) menunjukkan bahwa pelatihan literasi digital berhasil meningkatkan pengetahuan petani mengenai praktik pertanian berkelanjutan. Misalnya, pemahaman petani tentang pasca panen meningkat signifikan dari 31% menjadi 69% setelah mengikuti program pelatihan. Hal ini membuktikan bahwa literasi digital dapat menjadi kunci untuk mengatasi tantangan pertanian modern, seperti perubahan iklim dan pasar yang semakin kompetitif.

Selain itu, teknologi digital memungkinkan petani untuk mengakses informasi harga pasar, mengatur keuangan, hingga menjual produk langsung kepada konsumen melalui platform *e-commerce*. Hal ini sesuai dengan penelitian oleh Setiawan et al. (2024) mengeksplorasi pengaruh literasi digital terhadap pemanfaatan *e-commerce* dalam sektor pertanian di Indonesia, khususnya di kalangan petani milenial. Temuan menunjukkan bahwa literasi digital sangat penting untuk adopsi *e-commerce*.

WAWASAN

E-commerce menawarkan manfaat signifikan, termasuk peningkatan efisiensi rantai pasok dan akses pasar yang lebih luas, yang dapat meningkatkan daya saing petani. Oleh karena itu, literasi digital di sektor pertanian menjadi sangat penting untuk meningkatkan kapasitas petani dalam mengoptimalkan teknologi untuk pertanian yang lebih maju.

Meskipun demikian, riset oleh Fharaz et al. (2022) mengeksplorasi pengaruh literasi digital untuk meningkatkan pemasaran hasil pertanian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adopsi e-marketing masih rendah karena kurangnya keterampilan literasi digital di antara petani. Penelitian ini melibatkan 21 petani mitra perusahaan Sayurbox dan menemukan bahwa tingkat literasi digital dan e-marketing mereka berada pada kategori sedang.

Kelemahan utama petani tersebut adalah kurangnya akses internet memadai dan kurangnya pengetahuan dasar mereka tentang penggunaan *smartphone* atau komputer. Hal ini menyebabkan potensi teknologi digital untuk meningkatkan produktivitas pertanian belum sepenuhnya terealisasi. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan keterampilan digital petani melalui edukasi dan pelatihan yang tepat guna untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing dalam industri pertanian.

Ada beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam meningkatkan literasi digital petani, antara lain:

- a. Keterbatasan akses infrastruktur digital di daerah pedesaan yang masih minim jaringan internet.
- b. Kurangnya pelatihan dan edukasi mengenai teknologi digital yang relevan dengan sektor pertanian.

- c. Rendahnya minat dari sebagian petani yang lebih nyaman dengan metode konvensional.
- d. Keterbatasan finansial untuk membeli perangkat digital seperti *smartphone* atau laptop yang dibutuhkan untuk akses informasi.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, berbagai langkah dapat diambil oleh pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan institusi pendidikan:

- a. Program Edukasi dan Pelatihan, melibatkan penyuluh pertanian bisa berupa sosialisasi, diskusi, ceramah, dan pelatihan untuk penggunaan teknologi dasar kepada petani. Program ini dapat mencakup penggunaan aplikasi cuaca, pasar digital, dan pengelolaan keuangan berbasis digital. Maka, perlu dikembangkan model literasi digital dan memperkenalkan teknologi pertanian digital yang disesuaikan dengan kebutuhan petani.
- b. Peningkatan Infrastruktur Digital, pemerintah perlu memperluas akses jaringan internet di daerah pedesaan agar petani dapat memanfaatkan teknologi digital dengan optimal. Studi terbaru menyoroti pentingnya memperluas akses internet di daerah pedesaan untuk mendukung pembangunan pertanian di Indonesia. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, penelitian dari Subejo (2019) mengusulkan model-model untuk memanfaatkan informasi dan komunikasi digital dalam pembangunan perdesaan, dengan menekankan perlunya peningkatan infrastruktur, aplikasi yang

disesuaikan, dan panduan pengguna yaitu petani di kalangan penduduk pedesaan.

- c. Kolaborasi dengan Swasta dan *Start-Up*. Startup teknologi pertanian (agritech) dapat membantu memberikan solusi digital yang mudah digunakan oleh petani. Kolaborasi ini juga bisa mencakup penyediaan aplikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan petani Indonesia. Hal ini sesuai dengan penelitian oleh Dewi et al. (2022) mengkaji pengenalan literasi digital pada petani di Desa Pandanmulyo (Jawa Timur) melalui sosialisasi teknologi pertanian digital yang dilakukan dengan kerjasama *start-up* “Kerabatani.” Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pelatihan kepada petani mengenai penggunaan aplikasi digital untuk mengukur pH, kelembaban, dan kesuburan tanah. Sebelum sosialisasi, petani belum memanfaatkan teknologi dalam pertanian, yang menyebabkan kesulitan dalam menentukan jenis tanaman yang sesuai dan sering mengalami gagal panen. Setelah program, pengetahuan petani meningkat secara signifikan, yang berimplikasi pada pengurangan risiko gagal panen dan peningkatan produktivitas pertanian. Dengan demikian, literasi digital diharapkan dapat meningkatkan perekonomian petani dan kemajuan usaha pertanian di desa tersebut.
- d. Subsidi Perangkat Digital. Program bantuan perangkat digital dapat mendukung akses teknologi bagi petani miskin dan meningkatkan inklusi digital. Bantuan pemerintah berperan positif dalam meningkatkan inklusi digital

rumah tangga petani. Selain itu, petani yang berusia muda cenderung lebih inklusif secara digital sehingga perlu diperhatikan dalam pemberian bantuan perangkat digital. Serta implementasi desa digital, termasuk pembangunan infrastruktur internet dan pelatihan penggunaan aplikasi digital, juga dapat meningkatkan akses informasi pertanian bagi petani.

Kesimpulan

“Peningkatan literasi digital di sektor pertanian merupakan langkah krusial untuk mencapai swasembada pangan dan mewujudkan pertanian yang maju dan berkelanjutan. Sayangnya, kendala seperti keterbatasan akses teknologi, rendahnya tingkat pendidikan, dan kurangnya dukungan infrastruktur masih menjadi hambatan utama. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya komprehensif dari berbagai pihak”

Pertama, pemerintah perlu berperan aktif dalam menyediakan infrastruktur digital yang memadai di daerah pedesaan, serta merancang

WAWASAN

program pelatihan dan edukasi yang efektif untuk meningkatkan literasi digital petani. Kedua, sektor swasta, khususnya perusahaan teknologi pertanian, dapat berkontribusi dengan mengembangkan aplikasi dan perangkat yang mudah digunakan dan sesuai dengan kebutuhan petani. Ketiga, perguruan tinggi dan lembaga penelitian dapat berperan sebagai pusat pengembangan inovasi teknologi pertanian dan menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang ini.

Dengan sinergi antara pemerintah, swasta, dan akademisi, diharapkan literasi digital petani dapat meningkat secara signifikan. Hal ini akan membuka peluang bagi petani untuk mengakses informasi yang lebih luas, meningkatkan produktivitas, dan memperoleh pendapatan yang lebih baik. Pada akhirnya, peningkatan literasi digital akan berkontribusi pada pembangunan pertanian yang berkelanjutan dan mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Daftar Pustaka

1. Masyhur, F. (2016). *The ICT Literacy Development Model for Farmers and Fishermen Community (Model Pengembangan Literasi TIK Masyarakat Tani dan Nelayan)*. *Jurnal Pekommas*, 1(1), 101-110
2. Makin, M., & Waningrum, A. (2023). *Studi Deskriptif Kecakapan Literasi Digital Kelompok Tani Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta*. *G-Couns: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 7(03), 722-729.
3. Nuryadi, B. A., Saleh, K., & Salampesi, Y. L. (2023). *Pengaruh Informasi Digital terhadap Kinerja Penyuluh Pertanian dengan Literasi Informasi sebagai Variabel Intervening*. *Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(3), 28-40.
4. Naufal, H. A. (2021). *Literasi digital*. *Perspektif*, 1(2), 195-202.
5. Sangadji, Z., Taufik, M., Kahar, M. S., Sarawa, S., Aba, L., Uge, S., ... & Febriadi, I. (2024). *Literasi Digital Pertanian sebagai Upaya Peningkatan Pengetahuan Masyarakat dalam Budidaya Tanaman Berkelanjutan di Kabupaten Tambora*. *Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8(3), 437-444.
6. Setiawan, H. A. (2024). *Pengaruh Literasi Digital terhadap Pemanfaatan E-Commerce pada Hasil Pertanian*. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(5), 1598-1607.
7. Fharaz, V. H., Kusnadi, N., & Rachmina, D. (2022). *Pengaruh literasi digital terhadap literasi E-marketing pada petani*. *Jurnal Agribisnis Indonesia (Journal of Indonesian Agribusiness)*, 10(1), 169-179.
8. Subejo, S. (2019). *Desain Model Pemanfaatan Informasi dan Komunikasi Digital dalam Pembangunan Pertanian dan Pedesaan*. *Suluh Pembangunan*, 1(1),
9. Dewi, A.N., Sholeha, M., Rohiimaa, S., & Novitasari, A.N. (2022). *Pengenalan Literasi Digital Pada Petani Desa Pandanmulyo Melalui Sosialisasi Digital of Agriculture*. *Jurnal KARINOV*, 5(2), 119-123



PINJAMAN DAN HIBAH LUAR NEGERI KEMENTERIAN PERTANIAN 2025

Oleh: Gatot Budi S - Perencana Ahli Madya
dan Esty Ciptaningrum - Perencana Ahli Pertama

“

“Inspektorat Jenderal melakukan pengawasan terhadap program/kegiatan guna memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundangan, salah satunya dengan melakukan pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi hasil audit. Adapun mitra berperan sebagai pembuat komitmen dan pelaksana kegiatan pinjaman, penanggungjawab kegiatan pinjaman, pelaksanaan tindaklanjut rekomendasi atas temuan auditor pada program/kegiatan dan layanan yang didanai dari pinjaman”

”

Kementerian Pertanian (Kementan) mengelola Program Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) untuk menjalin hubungan dengan negara lain atau lembaga mitra. Pedoman PHLN lingkup Kementan diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 74 Tahun 2012. Selama ini, Kementan telah banyak memanfaatkan berbagai peluang kerjasama, baik melalui forum Bilateral, Regional maupun Multilateral untuk mendapatkan PHLN.

PHLN merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan dalam rangka mendukung pembangunan di berbagai sektor. PHLN diperlukan karena adanya kebutuhan investasi untuk membangun ekonomi dan adanya keterbatasan sumber dana pemerintah untuk investasi. Pinjaman Luar Negeri (PLN) adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa, barang, atau jasa yang diperoleh dari luar negeri (LN) yang harus dibayarkan kembali dengan persyaratan tertentu. Sedangkan Hibah Luar Negeri (HLN) adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa, barang, atau jasa termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang diperoleh dari pemberian luar negeri yang tidak perlu dibayarkan kembali.

Utang bukan merupakan tujuan melainkan alat agar pemerintah dapat menjalankan fungsi penting dan mendesak dengan cepat tanpa penundaan (menjaga momentum dan menghindari opportunity loss, menjaga dan mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengembangkan pasar keuangan/market development, melibatkan peran serta generasi berikutnya dalam berinvestasi yang memberikan manfaat jangka Panjang, merupakan *channel* koordinasi dengan Bank

Indonesia). Terdapat dua prinsip utang negara, yakni 1) efisiensi biaya (*cost dan risk*) yaitu mengutamakan instrumen utang dengan biaya minimum dan risiko terkendali, serta 2) prinsip kehati-hatian dengan pengelolaan dan monitoring risiko utang terus-menerus.

Permasalahan

Kondisi *existing* realisasi loan sampai dengan triwulan II 2024 sebesar 68,1% dari target penarikan pinjaman TA 2024. Total penyerapan sampai dengan triwulan II 2024 sebesar 32,4% dari total nilai pinjaman seperti tergambar pada Gambar 1.

Dari *overview* kondisi disbursed PLN dari posisi penyerapan luar negeri berdasarkan tahun *closing*, ada 2 kondisi yang perlu diperhatikan seperti masih terdapatnya beberapa pinjaman dalam kondisi *At Risk* yang berkepanjangan dan masih terdapat beberapa pinjaman dalam kondisi *Zero Disbursement* yang cukup lama (*serious delay*).

Pembahasan

Terdapat lima *stakeholders* pengelolaan pinjaman, yaitu:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), berperan sebagai Perencanaan/*blue book, green book*, dan daftar kegiatan; penilaian kelayakan kegiatan; dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi (*monev*) program/kegiatan.
2. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berperan sebagai penetapan batas maksimum pinjaman; negosiasi membuat komitmen perjanjian pinjaman; penganggaran, register, monev, dan pelaporan pinjaman.
3. K/L berperan sebagai Pembuat komitmen dan pelaksana kegiatan pinjaman; penanggungjawab kegiatan

WAWASAN

pinjaman; pelaksanaan tindak lanjut dan rekomendasi atas temuan auditor pada kegiatan pinjaman.

4. Pemberi pinjaman/lender, dan
5. Aparat Pengawasan *Intern* Pemerintah/ APIP (Inspektorat Jenderal/Itjen) pada K/L. Peran Itjen dalam hal ini melakukan pengawasan terhadap program/kegiatan serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundangan, juga melakukan pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi hasil audit.

Proses bisnis pinjaman dapat dilihat pada bagan berikut:

Kementerian Pertanian tahun 2025 mendapat PHLN naik sebesar 197,09% dari tahun 2024, terdiri dari PLN dan HLN.

Adapun PLN tahun 2025 terdiri dari:

1. *Agriculture Value Chain Development/ Integrated Corporation of Agriculture Resources Empowerment (ICARE)* dari World Bank;
2. *Rural Empowerment and Agricultural Development Scaling Up Initiative Programme (READSI)* dari International Fund of Agriculture Development/IFAD;
3. *Youth Entrepreneurship and Employment Support Service Programme (YESS)* dari IFAD;
4. *The Development of Integrated Farming System in Upland Areas Project (UPLANDS)* dari IFAD dan Islamic Development Bank (IsDB);
5. *Horticulture Development in Dryland Areas Sector Project (HDDAP)* dari Asian Development Bank (ADB) dan IFAD.

Sedangkan HLN tahun 2025 berupa *Youth Entrepreneurship and Employment Support Service Programme (YESS)* dari IFAD.

Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan PHLN diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, Permen PPN No. 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengajuan Usulan, Penilaian, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri dan Hibah, serta Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 224 Tahun 2011 diubah Menjadi PMK No. 180 Tahun 2012 (Pasal 4) tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi atas Pinjaman dan Hibah kepada Pemerintah.

Upaya peningkatan kinerja pelaksanaan pinjaman luar negeri dapat dilakukan dengan:

1. Timeline rencana pelaksanaan kegiatan dan penarikan anggaran. Pelaksana kegiatan harus menyusun timeline rencana pelaksanaan kegiatan dan penarikan anggaran secara detail sebagai milestone yang harus dicapai, sehingga target penyelesaian kegiatan dapat dicapai dengan baik dan tepat waktu. *Timeline* harus *diupdate* secara periodik mengikuti perkembangan pelaksanaan kegiatan.
2. Pengadaan Lahan. Untuk kegiatan yang memerlukan lahan perlu dipastikan bahwa lahan sudah tersedia sebelum kegiatan efektif. Pelaksana kegiatan perlu memperhitungkan dengan cermat rencana pembebasan lahan sebelum kegiatan efektif.
3. Antisipasi Potensi Permasalahan. Pelaksana kegiatan harus mampu mengantisipasi potensi permasalahan yang menghambat kinerja pelaksanaan yang menghambat kinerja pelaksanaan. Pelaksana kegiatan harus mampu

menyiapkan mitigasi permasalahan dengan cepat agar pelaksanaan kegiatan tidak terhambat.

4. Kesiapan *Stakeholder* dalam Pelaksanaan *On Granting dan On Lending*. Untuk kegiatan yang akan diterushibahkan (*on grating*) maupun yang akan diterus pinjaman (*on lending*), pelaksana kegiatan perlu memastikan kesiapan para pihak yang terlibat terutama pemerintah daerah atau instansi pelaksana lainnya, baik kesiapan pelaksanaan maupun kesiapan anggaran pendukung yang dibutuhkan.
5. Kesesuaian Pelaksanaan Kegiatan dengan Peraturan yang Berlaku. Pelaksana kegiatan harus memperhatikan dan memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan sudah memenuhi ketentuan yang berlaku atau sesuai dengan peraturan yang ada.
6. Tindak Lanjut Berita Acara. Pelaksana kegiatan harus segera menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelaksanaan kegiatan yang sudah disepakati dalam Berita Acara. Pelaksana kegiatan harus melakukan koordinasi secara intensif dengan para pihak untuk membantu percepatan permasalahan.

Penutup

Pelaksana kegiatan harus memastikan bahwa kegiatan sudah siap untuk dilaksanakan sebelum pinjaman aktif. Pinjaman yang terlambat diserap dapat meningkatkan *commitment fee* dan dapat memperlambat penyelesaian pekerjaan, setelah pinjaman *closing* masih terdapat kewajiban *repayment*. BPKP melalui perpanjangan tangan

Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah/APIP pada K/L melakukan pengawasan terhadap program/kegiatan serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundangan.

DAFTAR PUSTAKA

1. <https://siporphln.pertanian.go.id>
2. <https://www.bappenas.go.id>
3. <https://www.djppr.kemenkeu.go.id>



sumber: Canva

KOMUNIKASI DAN PERILAKU KINERJA PROFESIONAL AUDITOR INTERNAL

Oleh: Indrastari Sintia Laksmi - Pranata Humas

“Komunikasi dalam audit merupakan langkah awal auditor mengkomunikasikan tugas profesionalnya dengan auditi. Komunikasi yang dibangun secara baik akan mendorong kelancaran auditor menyampaikan informasi serta memperoleh informasi untuk mencari dan menganalisis bukti-bukti audit yang dibutuhkan.”

Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) memiliki peran penting untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bersih serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Saat ini ukuran

keberhasilan suatu penugasan audit bukan dari berapa jumlah temuan yang dihasilkan namun dilihat dari kualitas rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti oleh auditi dan mampu menyelesaikan permasalahan secara tuntas sehingga tidak lagi terjadi temuan berulang. Dalam perkembangannya, peran dan citra internal auditor sedikit demi sedikit mengalami pergeseran paradigma dari yang sebelumnya

dikenal sebagai *watchdog* terkait perannya sebagai “penjaga” asset negara hingga saat ini berkembang menjadi konsultan bagi mitra yang mampu memberikan nilai (*add values*) dan sebagai katalisator bagi suatu mitra dalam mencapai tujuannya.

“Auditor selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam melaksanakan tugasnya tidak lepas dari proses komunikasi.”

Komunikasi merupakan bagian integral dalam proses audit intern yang dilakukan oleh Inspektorat, mulai dari perencanaan penugasan, pelaksanaan pengujian, hingga pemantauan tindak lanjut, semuanya memerlukan keterampilan berkomunikasi. Dengan menerapkan keterampilan berkomunikasi, pelaksanaan audit akan berjalan efektif dan efisien. Efektif dalam arti audit dapat mencapai hasil-hasil yang diinginkan. Efisien karena proses audit dapat dilaksanakan dengan lancar sehingga sumber daya audit benar-benar dapat digunakan untuk mencapai tujuan audit.

Pelaksanaan komunikasi audit yang telah dilaksanakan oleh auditor belum mencapai hasil yang maksimal, dapat dilihat dari data penyelesaian Laporan Hasil Audit (LHA) yang sebagian besar penyelesaian laporan hasil audit melewati dari batas akhir penugasan yang diberikan serta dilihat dari tingkat penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit (TLHA) yang masih sangat rendah. Hal ini menandakan rendahnya partisipasi dari audit untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil dari kegiatan audit. Permasalahan yang sampai saat ini masih sering menjadi salah satu

hal yang mengganggu para Auditor Internal adalah bagaimana auditi mampu dan mau merespon permintaan data atau dokumen yang diperlukan Auditor Internal maupun melaksanakan rekomendasi yang dituliskan oleh Auditor Internal dalam Laporan Hasil Auditnya. Permasalahan ini, respon auditi atas rekomendasi, secara tidak langsung juga dipengaruhi bagaimana bentuk komunikasi Auditor Internal dengan auditi.

Kualitas hasil audit merujuk pada sejauh mana auditor dapat berkomunikasi dengan auditi untuk menyampaikan hasil laporan hasil keuangan instansi/organisasi yang disajikan mencerminkan kondisi keuangan dan operasional yang sebenarnya. Sementara itu, komunikasi audit adalah proses pertukaran informasi dan temuan antara auditor dan auditi selama dan setelah dilakukan audit. Alasan mengapa komunikasi audit yang baik berdampak positif pada kualitas audit yaitu karena melalui komunikasi yang efektif, auditor dapat memahami lebih dalam tentang proses bisnis auditi, mekanisme tempat auditi bekerja, risiko yang dihadapi, dan masalah khusus yang relevan. Pengetahuan yang mendalam tentang proses bisnis auditi akan membantu auditor dalam mengidentifikasi risiko audit dan fokus pada area yang lebih kritis.

Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi (pesan, ide, gagasan) dari satu pihak kepada pihak lain. Secara umum komunikasi dapat terbentuk secara efektif jika telah terjadi kesamaan penafsiran yang dimiliki oleh seorang komunikator dengan komunikan atas pesan yang diberikan dan diterima. Kegagalan dalam berkomunikasi sering terjadi karena banyak hambatan-hambatan. Salah satu hambatan yang ditimbulkan adalah karena persepsi yang berbeda. Apabila hambatan

dalam berkomunikasi dapat dihilangkan atau setidaknya diperkecil maka kemungkinan komunikasi yang dilaksanakan akan menjadi lebih baik.

Bagi auditor komunikasi sangatlah penting karena kegiatan audit menyangkut proses penyampaian informasi dan perolehan informasi yang diperlukan dalam mencapai hasil audit. Dalam kaitan ini para auditor setidaknya dapat menciptakan suasana psikologis terhadap auditi. Suasana psikologis tersebut antara lain menciptakan suasana nyaman, aman dan auditi tidak merasa terancam dalam memberikan informasi yang dibutuhkan menyangkut adanya fakta penyimpangan yang ditemukan auditor. Selain itu, komunikasi yang baik juga mampu mengurangi kesalahpahaman dimana komunikasi yang jelas dan terbuka antara auditor dan auditi dapat mengurangi kesalahpahaman yang mungkin terjadi selama proses audit. Kesalahpahaman yang tidak terpecahkan dapat menyebabkan penyimpangan dalam laporan keuangan dan mengurangi kualitas audit. Dalam rangka memastikan komunikasi audit yang baik, auditor harus berkomunikasi efektif dengan auditi selama proses audit. Komunikasi yang baik juga terkait kemampuan mendengarkan masukan dan penjelasan dari auditi dan menjelaskan temuan audit dengan jelas. Untuk itu Komunikasi audit yang baik memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas audit dan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap laporan keuangan yang diaudit.

Manfaat dan Prinsip Komunikasi yang Efektif pada Proses Audit

Komunikasi yang efektif merupakan inti dari

keberhasilan penugasan audit, memastikan para pemangku kepentingan memahami, menerima, dan menindaklanjuti temuan audit. Bagian ini membahas praktik terbaik untuk komunikasi audit, menguraikan prinsip, strategi, dan pertimbangan untuk mengoptimalkan pertukaran informasi antara auditor dan pemangku kepentingan. Ini merupakan elemen penting dalam setiap fase kegiatan audit internal. Internal auditor harus berkomunikasi secara jelas, ringkas, dan akurat dengan auditi, manajemen, komite audit, dan pemangku kepentingan lain.

Komunikasi yang efektif dalam audit internal memiliki beberapa manfaat penting, di antaranya:

1. Memperbaiki citra auditor internal, hal ini sangat bermanfaat karena selama ini mindset yang terbentuk di auditi yakni Auditor Internal hanya mencari-cari kesalahan, kurang ramah, serta pelbagai stigma negatif lainnya. Tentunya dengan meningkatkan cara berkomunikasi seorang Auditor Internal akan berpengaruh baik terhadap penilaian auditi serta penerimaan mereka atas kehadiran Auditor Internal.
2. Memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam pengujian audit, ini sejalan dengan fungsi audit dimana dilaksanakan kegiatan memperoleh dan mengumpulkan data dan informasi untuk diuji dalam rangka menghasilkan kesimpulan atas suatu masalah serta rekomendasi yang diberikan. Sehingga dengan adanya komunikasi yang baik akan sedikit banyak membantu Auditor Internal dalam proses tersebut.
3. Mengendalikan dan mengoordinasikan kegiatan-kegiatan tim audit, ini dikaitkan

dengan bagaimana seorang Auditor Internal mampu berkoordinasi di dalam timnya sendiri. Tujuannya adalah agar setiap pelaksanaan dan hambatan-hambatan yang ada dalam penugasan tersebut dapat teratasi sehingga tujuan dari pelaksanaan audit dapat tercapai.

4. Meningkatkan mutu audit, ini merupakan tujuan akhir sebuah proses Audit Internal yakni menghasilkan Laporan Hasil Audit yang mudah dipahami dan mampu ditindalanjuti oleh auditi

Prinsip komunikasi audit yang efektif menekankan pada kejelasan, transparansi, dan relevansi. Auditor harus mengomunikasikan temuan dengan cara yang mudah dipahami kepada para pemangku kepentingan, sebisa mungkin menghindari jargon dan bahasa teknis. Menjaga profesionalisme dan integritas selama komunikasi menumbuhkan kepercayaan dan kredibilitas. Auditor harus menyajikan temuan secara objektif, tanpa bias atau pengaruh yang tidak semestinya, dan mematuhi standar etika dalam semua interaksi. Mengembangkan rencana komunikasi untuk penugasan audit memastikan bahwa informasi yang relevan segera disebarluaskan kepada para pemangku kepentingan yang sesuai. Rencana komunikasi harus menguraikan tujuan, audiens, saluran, dan frekuensi komunikasi, yang menyediakan peta jalan untuk keterlibatan yang efektif selama proses audit.

Prinsip Komunikasi Efektif (REACH) antara lain :

1. *Respect*, kondisi dimana antara Auditor dengan auditi saling menghormati satu dengan yg lainnya. Ingatlah bahwa

pada prinsipnya manusia ingin dihargai dan dianggap penting. Jika kita bahkan harus mengkritik atau memarahi seseorang, lakukan dengan penuh respek terhadap harga diri dan kebanggaan seseorang. Jika kita membangun komunikasi dengan rasa dan sikap saling menghargai dan menghormati, maka kita dapat membangun kerjasama yang menghasilkan sinergi yang akan meningkatkan efektifitas kinerja kita baik sebagai individu maupun secara keseluruhan sebagai sebuah tim;

2. *Empathy* (Empati), merupakan kondisi yang lebih mendalam dibandingkan dengan simpati. Empati adalah kemampuan kita untuk menempatkan diri kita pada situasi atau kondisi yang dihadapi oleh orang lain. Salah satu prasyarat utama dalam memiliki sikap empati adalah kemampuan kita untuk mendengarkan atau mengerti terlebih dulu sebelum didengarkan atau dimengerti oleh orang lain;
3. *Audible*, pengertiannya adalah dapat didengarkan atau dimengerti dengan baik. Jika empati berhubungan dengan bagaimana kita mau dan mampu mendengarkan lawan bicara kita, maka audible adalah kondisi dimana apa yang kita sampaikan kepada lawan bicara dapat dipahami atau diterima dengan baik.
4. *Clarity*, merupakan pengertian dari sebuah kejelasan. Dalam sebuah percakapan, tentunya diharapkan apa yang disampaikan oleh pemberi pesan (komunikator) dapat diterima dan diterjemahkan dengan baik oleh penerima pesan (komunikan).
5. *Humble*, dapat diartikan sebagai sikap

yang memiliki keterkaitan dengan sikap *Respect*. Kunci komunikasi efektif bukan hanya tentang menyampaikan dengan tepat, tetapi juga mendengarkan dengan baik. Yang dimaksud di sini bukan hanya *hearing*, melainkan *listening* atau menyimak dengan penuh perhatian -- yaitu ketika kita menunjukkan minat yang tulus terhadap apa yang disampaikan lawan bicara, dengan tujuan untuk mengerti.

Beberapa hal pula yang menjadi perhatian Auditor Internal selaku komunikator dalam berkomunikasi dengan auditi selaku komunikan:

1. Menghargai setiap pertanyaan, jawaban dan semua respons yang disampaikan oleh auditi;
2. Bersikap sabar untuk tidak memotong pembicaraan auditi;
3. Bersikap tenang dalam menghadapi berbagai kondisi pada saat berhadapan dengan auditi;
4. Bersikap bebas prasangka, atau tidak evaluatif, kecuali jika sangat diperlukan;
5. Bersikap penuh pengertian terhadap pendapat auditi meskipun bertentangan atau kurang tepat tanpa menyinggung perasaan auditi.

PRILAKU PROFESIONAL AUDITOR INTERNAL

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab diperlukan adanya suatu budaya etis dalam profesi APIP di Kementerian Pertanian sesuai dengan Keputusan Inspektur Jenderal Nomor : 458A/Kpts/KP.520/H/04/2012 tanggal 30 April 2012 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Kementerian Pertanian.

Prilaku profesional auditor salah satu penjamin kualitas dari hasil pekerjaan auditor dapat dipengaruhi oleh rasa kebertanggungugutan (akuntabilitas) yang dimiliki auditor dalam menyelesaikan pekerjaan audit. Akuntabilitas merupakan dorongan psikologi sosial yang dimiliki seseorang untuk menyelesaikan kewaibannya yang akan dipertanggungjawabkan kepada lingkungannya. Akuntabilitas yang dimiliki auditor dapat meningkatkan proses kognitif auditor dalam mengambil keputusan. Akuntabilitas diukur dengan seberapa besar motivasi auditor dalam menyelesaikan pekerjaan, dan keyakinan bahwa pekerjaan mereka akan diperiksa oleh atasan serta mengukur seberapa besar usaha (daya pikir) auditor untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Selain profesionalisme, integritas, obyektifitas, dan akuntabilitas, seorang auditor juga harus mempunyai pengalaman yang cukup agar dapat membuat keputusan dalam laporan keuangan yang baik. Auditor yang mempunyai pengalaman yang berbeda, akan berbeda pula dalam memandang dan menanggapi informasi yang diperoleh selama melakukan pemeriksaan dan juga dalam memberikan kesimpulan auditi terhadap obyek yang diperiksa berupa pemberian pendapat. Pada saat auditor mempertimbangkan keputusan mengenai pendapat apa yang akan dinyatakan dalam laporan audit, material atau tidaknya informasi, mempengaruhi jenis pendapat yang akan diberikan oleh auditor. Auditor harus berprilaku profesional dan etis dalam menjalankan tugasnya, agar dapat menjaga kepercayaan publik, reputasi instansi audit, dan kredibilitas laporan audit.

Berikut adalah beberapa perilaku profesional yang diharapkan dari seorang auditor:

1. Integritas

Dalam semua urusan profesional, seorang auditor harus terus terang dan jujur saat membuat semua keputusan dan pengamatan tanpa bias. Integritas adalah aspek penting dari proses audit karena menentukan kredibilitas dan keandalan audit. Integritas auditor sangat penting dalam menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan, yang mengandalkan laporan audit untuk membuat keputusan yang tepat.

Jika auditor tidak memiliki integritas, hal itu dapat membahayakan objektivitas dan keandalan audit, yang dapat menimbulkan konsekuensi yang parah bagi organisasi dan para pemangku kepentingannya. Selain itu, jika auditor dianggap kurang berintegritas, maka dapat merusak reputasi dan kredibilitasnya, yang dapat berdampak negatif terhadap profesi audit secara keseluruhan. Oleh karena itu, sangat penting bagi auditor untuk menjaga integritas mereka dan memastikan bahwa pekerjaan mereka jujur, benar, dan tidak bias. Hal ini membantu menjaga kredibilitas dan keandalan proses audit dan memastikan bahwa para pemangku kepentingan dapat mempercayai laporan audit.

2. Objektivitas

Konflik kepentingan atau pengaruh yang tidak semestinya dari orang lain tidak boleh dibiarkan mengalahkan keputusan profesional atau bisnis oleh auditor profesional. Objektivitas adalah aspek penting dari proses audit karena

memastikan bahwa auditor tetap tidak bias dan independen dalam penilaian mereka terhadap informasi keuangan. Objektivitas juga sangat penting dalam menjaga kredibilitas dan keandalan audit karena memastikan bahwa auditor tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau bias yang dapat membahayakan objektivitas audit.

Jika auditor tidak objektif, hal itu dapat menyebabkan kesimpulan yang salah dan laporan keuangan yang menyesatkan, yang dapat memiliki konsekuensi berat bagi organisasi dan para pemangku kepentingannya. Di sisi lain, jika auditor membenciorganisasi, mereka mungkin memiliki sikap kritis yang berlebihan terhadap informasi keuangan, yang mengarah ke penilaian yang terlalu negatif. Oleh karena itu, penting bagi auditor untuk menjaga objektivitas mereka dan tetap tidak bias dalam penilaian mereka atas informasi keuangan. Hal ini membantu memastikan kredibilitas dan keandalan proses audit dan membantu menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan.

3. Kompetensi profesional dan kehati-hatian

Auditor profesional memiliki tugas berkelanjutan untuk menjaga pengetahuan dan keahlian profesional mereka tetap *up to date* untuk memastikan layanan profesional yang kompeten kepada pelanggan atau pemberi kerja mereka berdasarkan praktik, undang-undang, dan prosedur saat ini. Kompetensi profesional dan kehati-hatian adalah aspek penting dari proses audit karena

mereka memastikan bahwa auditor memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas mereka secara efektif. Auditor bertanggung jawab untuk meninjau dan mengevaluasi catatan dan laporan keuangan organisasi untuk memastikan bahwa catatan dan laporan tersebut akurat dan sesuai dengan hukum dan peraturan yang relevan. Kompetensi profesional mengacu pada pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh auditor melalui pendidikan dan pengalaman.

Auditor harus mempertahankan kompetensi profesionalnya dan terus memperbarui pengetahuan dan keterampilannya untuk memastikan bahwa mereka kompeten untuk melaksanakan tugasnya. Kehati-hatian mengacu pada tingkat kecermatan dan perhatian yang harus dilakukan auditor dalam pekerjaannya. Auditor harus mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa mereka memiliki pemahaman yang lengkap dan akurat tentang informasi keuangan dan tidak boleh mengabaikan tugas profesional mereka. Baik kompetensi profesional maupun kecermatan sangat penting dalam memastikan keandalan dan kredibilitas proses audit. Jika auditor tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan atau gagal untuk berhati-hati dalam pekerjaan mereka, hal itu dapat menyebabkan kesimpulan yang salah dan laporan keuangan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan konsekuensi yang parah bagi organisasi dan para pemangku kepentingannya.

4. Kerahasiaan

Auditor profesional harus menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh melalui hubungan profesional dan bisnis dan tidak membocorkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa otorisasi yang cukup dan eksplisit. Hanya ada pengecualian dalam melanggar kerahasiaan klien, yang mengikat secara hukum. Seorang auditor profesional tidak boleh menggunakan atau menjual informasi rahasia yang diperoleh melalui interaksi profesional dan bisnis untuk kepentingan pihak luar atau keuntungan pribadi.

Oleh karena itu, penting bagi auditor untuk menjaga kerahasiaan dan melindungi informasi keuangan sensitif klien mereka. Hal ini membantu menjaga kepercayaan dan reputasi perusahaan audit dan memastikan bahwa informasi keuangan tidak disalahgunakan.

5. Profesionalisme dalam perilaku

Seorang auditor profesional harus mengikuti semua prosedur operasi standar dan hukum yang berlaku, sehingga menghindari tindakan apa pun yang membuat profesi menjadi tercela. Perilaku profesional juga penting dalam membangun kepercayaan dan menjaga reputasi perusahaan audit. Jika auditor berperilaku tidak profesional, hal itu dapat merusak kepercayaan dan reputasi, yang dapat menimbulkan konsekuensi negatif bagi organisasi dan para pemangku kepentingannya sehingga berdampak kepada penyajian kredibilitas laporan auditnya.

Auditor tidak profesional dalam perilakunya, maka dapat menimbulkan

konflik kepentingan atau kurangnya objektivitas, yang dapat membahayakan keandalan audit. Oleh karena itu, sangat penting bagi auditor untuk berperilaku secara profesional dan etis untuk menjaga kepercayaan dan reputasi perusahaan audit dan memastikan kredibilitas dan keandalan proses audit.

KESIMPULAN

1. Komunikasi merupakan hal yang sangat penting yang wajib diketahui dan dipahami Auditor Internal dalam setiap aktivitas Audit Internalnya;
 2. Komunikasi memiliki korelasi yang positif atau berpengaruh terhadap keberhasilan sebuah proses Audit Internal;
 3. Menciptakan sebuah Komunikasi yang Efektif setidaknya memperhatikan beberapa hal, diantaranya *Respect, Empathy, Audible, Clarity, Humble*;
 4. Menciptakan sebuah Komunikasi yang Efektif memang akan terasa sulit bagi yang belum terbiasa bicara lugas, namun tentu hal ini dapat dipelajari dan dilatih secara konsisten;
 5. Memperbaiki citra diri seorang Auditor Internal bukan dimulai dari mengkoreksi orang lain atau lawan bicara atau auditee namun dimulai dari diri sendiri.
4. https://www.kompasiana.com/yohanese_nho9334/66543b0634777c53282eb5c2/memahami-komunikasi-efektif-dalam-audit-internal?page=1&page_images=1
 5. https://ecampusontario-pressbooks-pub.translate.goog/internalauditing/chapter/10-05-best-practices-in-audit-communication/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sge#:~:text=dapat%20memengaruhi%20temuan.,Objektivitas,kepercayaan%20dan%20keyakinan%20pemangku%20kepentingan.
 6. <https://kledo.com/blog/etika-profesi-auditor/>

DAFTAR PUSTAKA

1. <https://accounting.binus.ac.id/2020/04/23/komunikasi-dan-psikologi-dalam-audit-optimalisasi-profesionalitas-auditor-internal/>
2. https://www.kompasiana.com/yohanese_nho9334/66543b0634777c53282eb5c2/memahami-komunikasi-efektif-dalam-audit-internal
3. <https://www.auditpro.id/artikel/memahami-komunikasi-efektif-dalam-audit-internal-panduan-lengkap/>

EKONOMI HIJAU EKONOMI BIRU

Oleh: Siti Juairiah, Perencana Ahli Muda
dan Esty Ciptaningrum - Perencana Ahli Pertama

“Pemerintah Indonesia melalui kementeriannya mengimplementasikan konsep *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang menjadi fokus Kementerian Pertanian, yaitu pertanian berkelanjutan atau *sustainable agriculture*.”

Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengusung Visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas yang akan diwujudkan dengan 8 misi yang disebut Asta Cita. Asta Cita yang kedua berisikan memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Kementerian Pertanian berperan penting dalam perwujudan Asta Cita yang kedua ini. Pada tahun 2024 swasembada pangan mulai diupayakan salah satunya dengan program Perluasan Areal Tanam (PAT) melalui kegiatan Optimasi Lahan (oplah) yang kemudian akan terus dilanjutkan melalui kegiatan cetak sawah pada tahun 2025 mendatang. Selain swasembada pangan, terdapat amanat ekonomi hijau dan ekonomi biru. Apa itu ekonomi hijau dan ekonomi biru?

Green Economy and Blue Economy

Ekonomi hijau (*green economy*) merupakan konsep ekonomi yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat yang disertai dengan mengurangi risiko kerusakan lingkungan. Istilah ekonomi hijau pertama kali dicetuskan dalam laporan *Blueprint for a Green Economy* dari sekelompok ekonom yang ditujukan kepada pemerintah Inggris tahun 1989 supaya mempertimbangkan konsep pembangunan berkelanjutan.

“Dalam ekonomi hijau, pertumbuhan lapangan kerja dan pendapatan didorong oleh investasi pemerintah dan swasta pada kegiatan ekonomi, infrastruktur dan aset yang memungkinkan pengurangan emisi karbon dan polusi, peningkatan efisiensi energi dan sumber daya, serta pencegahan hilangnya keanekaragaman hayati.”

Sumber daya alam dipandang sebagai aset penting dan sumber daya publik utamanya bagi masyarakat miskin yang mata pencahariannya bergantung pada sumber daya alam. Oleh karenanya, penerapan ekonomi hijau memiliki dampak positif bagi kehidupan sosial yang inklusif. Ekonomi hijau mendorong transformasi ekonomi ke arah investasi ramah lingkungan dengan karbon rendah, efisiensi sumber daya, dan kesejahteraan social, serta mendorong terciptanya pola konsumsi dan pertumbuhan produksi secara berkelanjutan. Ekonomi hijau juga menjadi penting dalam mewujudkan transformasi ekonomi menuju negara berpendapatan tinggi setara dengan negara maju, dan keluar dari *middle income trap*.

Terdapat dua peluang yang bisa dimanfaatkan dalam pengembangan ekonomi hijau. Pertama, transisi aktivitas ekonomi eksisting. Pada sektor energi, upaya transisi diarahkan melalui penerapan energi baru dan terbarukan, seperti energi surya, angin, hidro, dan biomassa. Peluang kedua yaitu memunculkan pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui pengembangan sektor dan aktivitas sirkular yang inovatif, termasuk industri berbasis sumber daya alam hayati berkelanjutan atau bio-ekonomi dan industri pemanfaatan limbah.

“Sedangkan ekonomi biru (*blue economy*) berdasarkan definisi dari World Bank, merupakan konsep ekonomi yang menekankan pada penggunaan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan penghidupan dan lapangan kerja sembari menjaga kesehatan ekosistem laut.”

Ekonomi biru diharapkan menjadi jawaban bagi permasalahan pengelolaan kelautan dan perikanan Indonesia, mengingat Indonesia merupakan negara maritim. Tujuan dari ekonomi biru yaitu membangun sistem ekonomi yang berkelanjutan berdasarkan prinsip-prinsip alami dan lokalitas di kawasan pesisir. Konsep ekonomi biru awalnya hanya mencakup produk-produk berbasis perikanan yang bernilai ekonomi. Namun saat ini cakupannya meluas hingga menjangkau kepada keberlanjutan ekosistem laut. Keberlanjutan ekosistem laut yang terintegrasi dengan keberlanjutan segala potensi yang ada di dalamnya (termasuk potensi perdagangan karbon biru) menjadi salah satu kontributor Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia. Penerapan ekonomi biru juga sejalan dengan konsep *Environment, Social, and Governance (ESG)* karena pelaksanaan ekonomi biru melibatkan triple bottom line tersebut.

Dalam kesempatan mendampingi kunjungan kenegaraan Presiden RI ke Beijing, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) pada 9 November 2024, Menteri Airlangga Hartanto melakukan penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU)* tentang *Deepening Blue Economy Cooperation* dengan Menteri Perdagangan RRT, Wang Wentao. Penandatanganan MoU disaksikan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden RRT Xi Ping. MoU ini mencakup kerjasama multisektoral, *Blue Economy* yang dalam MoU ini dimaksudkan sebagai pemanfaatan energi laut terbarukan yang berkelanjutan, pengelolaan perikanan dan akuakultur, pariwisata maritim, inovasi dan kerja sama industri.

Pertanian Berkelanjutan

Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai agenda pembangunan dunia yang telah disepakati oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberi tuntunan negara-negara dalam pembuatan kebijakan dan pendanaan sampai dengan tahun 2030. Pemerintah Indonesia melalui kementeriannya mengimplementasikan konsep tersebut yang salah satunya menjadi fokus Kementerian Pertanian yaitu pertanian berkelanjutan atau *sustainable agriculture*. Pentingnya penataan dataran yang baik dan berkelanjutan melahirkan konsep pertanian berkelanjutan. *Sustainable agriculture* merupakan implementasi dari konsep *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan).

Pertanian berkelanjutan adalah pemanfaatan sumber daya yang dapat diperbarui dan sumber daya yang tidak dapat diperbarui untuk proses produksi pertanian dengan menekan dampak negatif terhadap lingkungan seminimal mungkin. Pertanian berkelanjutan bertumpu pada tiga pilar, yaitu ekonomi, sosial, dan ekologi yang bertujuan untuk mengurangi kerusakan lingkungan, mempertahankan produktivitas pertanian, meningkatkan pendapatan petani serta meningkatkan stabilitas dan kualitas kehidupan masyarakat di perdesaan.

Prinsip-prinsip pertanian berkelanjutan meliputi pengurangan penggunaan pestisida dan pupuk kimia, penggunaan teknologi hijau, pengelolaan air dan tanah yang efisien, dan praktik pertanian organik. *Sustainable agriculture* ini memungkinkan aktivitas pemenuhan kebutuhan makanan yang terus meningkat di tengah pertumbuhan penduduk yang cepat dapat mengurangi dampak

lingkungan yang negatif dari pertanian. Namun tantangan yang dihadapi untuk menjalankannya adalah semakin langkanya dan cepatnya penurunan produktivitas sumber daya alam itu sendiri. Sumber daya alam menurun sedangkan permintaan akan pangan meningkat dengan cepat. Proses transformasi perekonomian Indonesia menjadi ekonomi hijau yang berkelanjutan (pertanian yang berkelanjutan) harus menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan, kemudian sejalan dengan pencapaian target *Net Zero Emissions* (NZE) di 2060. Terdapat bermacam-macam pertanian berkelanjutan yang terdiri dari:

1. Pertanian Organik

Metode ini menghindari penggunaan pestisida dan pupuk kimia sintetis. Sebagai gantinya, pertanian organik mengandalkan bahan alami seperti kompos dan pupuk hijau, serta mengimplementasikan rotasi tanaman untuk menjaga kesuburan tanah.

2. Agroforestri

Gabungan antara pertanian dan kehutanan, dimana petani menanam tanaman pangan bersamaan dengan pohon-pohonan. Agroforestri membantu menjaga keseimbangan ekosistem, meningkatkan kualitas tanah, dan memberikan sumber pangan dan kayu.

3. Pertanian Permaculture

Sistem ini menggabungkan ekologi alami dengan metode pertanian berkelanjutan. Permaculture menekankan desain sistem yang meniru pola alam, sehingga menciptakan ekosistem yang seimbang dan produktif.

Simpulan

Ekonomi hijau dan ekonomi biru sebenarnya merupakan proses dialektis bagi masa depan bumi yang lebih baik. Perbedaan ekonomi hijau dan ekonomi biru terletak pada fokus pembangunan ekonominya. Penerapan konsep ekonomi hijau dan ekonomi biru telah diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.

DAFTAR PUSTAKA

1. *Materi Pelatihan Jabatan Fungsional Perencana Spesifik Ekonomi Research Centre for Conflict and Policy Universitas Brawijaya, 2024*
2. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6057/menko-airlangga-teken-kerja-sama-blue-ekonomi-indonesia-rrt-disaksikan-presiden-prabowo-dan-presiden-xi-jinping>
3. <https://upland.psp.pertanian.go.id/public/artikel/1672366739/memahami-lebih-jauh-konsep-pertanian-berkelanjutan>



NEWS

PENTINGNYA MEDIA MONITORING DALAM MENYIKAPI PEMBERITAAN TERHADAP PROGRAM PEMERINTAH

Oleh: Indrastari Sintia Laksmi - Pranata Humas
& Fitri Nurhasanah

“Setiap instansi pemerintah perlu media monitoring untuk dapat memantau berita yang disebarakan oleh media. Hal tersebut untuk mengoptimalkan kualitas layanan, meningkatkan citra positif sehingga dapat memastikan efektivitas dan responsivitas yang optimal pada pemberitaan yang pemerintah dan lembaga pelayanan publik.”

Perkembangan teknologi yang begitu pesat telah mengubah lanskap media massa dari media konvensional ke media digital, dan akibatnya berimbas pada strategi kehumasan dalam menjalin interaksi dengan media. Pemahaman terhadap perubahan media yang tercermin pada relevansi pesan kunci, optimalisasi media monitoring, dan mitigasi isu, menjadi hal penting yang perlu diperhatikan guna menjaga efektivitas komunikasi sebuah organisasi. Informasi merupakan kebutuhan penting bagi

seluruh lapisan masyarakat agar tetap *up to date*. Yang mana penyebarannya tidak terlepas dari adanya peran media. Akan tetapi, informasi yang tersebar bisa jadi bomerang, sehingga diperlukan media monitoring oleh organisasi pemerintah maupun individu demi menjaga kepercayaan target audiens. Cara kerja media monitoring tentu tidak sederhana. Diperlukan tim yang profesional dan berpengalaman agar kegiatan Monitoring media tepat sehingga tujuan dapat tercapai. Pemantauan media atau media monitoring adalah proses sistematis

dalam melacak, mengumpulkan, dan menganalisis pemberitaan atau penyebutan suatu entitas di berbagai saluran media, baik cetak, elektronik, maupun daring. Manfaat pemantauan media sangat penting bagi organisasi dan individu untuk memahami bagaimana mereka dipersepsikan oleh publik, mengidentifikasi peluang dan ancaman, serta mengelola reputasi mereka. Pemantauan media juga dapat membantu organisasi dalam mengambil keputusan yang tepat berdasarkan data dan informasi terkini.

Dalam era digital saat ini, pemantauan media menjadi semakin penting karena informasi dapat menyebar dengan cepat dan luas melalui berbagai platform media sosial. Organisasi dan individu perlu memantau media secara teratur untuk mengidentifikasi tren, mengelola krisis, dan melindungi reputasi mereka. Tidak terkecuali pada level pemerintahan membutuhkan media monitoring, terutama untuk meningkatkan pelayanan birokrasi dan manajemen risiko. Termasuk untuk mengikuti perkembangan berita politik, pemerintahan, dan administratif di semua bidang. Pemerintah juga mampu menemukan masalah yang akan menjadi prioritas penanganan di tengah lautan perbincangan di dunia maya. Sehingga mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Tidak hanya pemerintahan dalam arti birokrasi dan pelayanan publik, lembaga legislatif sebagai lembaga pembuat aturan atau kebijakan juga bisa memanfaatkan media monitoring secara intensif. Contohnya guna mendapatkan analisis dan laporan dengan cepat ketika ingin merumuskan aturan perundang-undangan tertentu. Masyarakat sebagai subyek regulasi juga mampu

memantau implikasi kebijakan secara lebih luas dan langsung. Layanan media monitoring bagi pemerintah mampu menyaring segudang konten yang terbit melalui surat kabar digital, situs web, dan lini masa media sosial hampir setiap hari. Berdasarkan kata kunci, layanan ini mampu mengumpulkan, menyampaikan, dan memberi peringatan kepada otoritas setempat terkait isu-isu penting yang mempengaruhi roda pemerintahan. Penyedia layanan juga harus bersifat inklusif dan kolaboratif. Kebutuhan dari klien menjadi hal yang utama terlepas dari level klien dalam birokrasi pemerintahan. Baik dari penentu kebijakan hingga street level *bureaucracy*. Aksesibilitas juga menjadi poin penting, baik akses ke dalam layanan hingga akses ke media yang dipantau.

Selain mendatangkan manfaat yang tak sedikit, media monitoring ternyata memiliki potensi yang tak terkira. Seluruh elemen pemerintahan, baik lembaga-lembaga eksekutif maupun legislatif, menghasilkan liputan media dalam jumlah besar. Jadi, tak hanya bersifat keluar, monitoring dapat digunakan untuk mendapatkan insight ke dalam pemerintahan itu sendiri. Potensi ini yang membuat media monitoring menjadi penting bagi otoritas pemerintah. Pemerintah jadi memiliki kapasitas untuk menyaring keramaian media dan menyampaikan konten yang penting. Misalnya, dalam kurun waktu tertentu pemerintah sedang menerbitkan sebuah aturan yang pada gilirannya memunculkan reaksi pro kontra di masyarakat.

Keriuhan media tersebut tentu saja penuh dengan halangan dan rintangan. Tak sedikit dari konten-konten di media

tersebut tidak memiliki bobot kualitas untuk ditanggapi ulang oleh pemerintah. Melalui media monitoring, pemerintah juga dapat menyaring, mengukur, bahkan mengabaikannya. Sehingga respons balik dari pemerintah bisa tepat guna dan tepat sasaran. Tak banyak layanan media monitoring yang mampu mencapai standar untuk bekerjasama dengan pemerintah seperti yang disebutkan sebelumnya. Terlebih iklim media semakin hari semakin rumit untuk dijelajahi. Media monitoring dituntut untuk terus berkembang sesuai dengan spesifikasi dan permintaan. Spesifikasi pemantauan khusus pemerintah tentu berbeda dengan sektor lainnya. Dengan pemerintah, layanan tersebut dituntut dapat memantik diskusi berdasarkan potongan-potongan informasi untuk mengungkap isu baru, membantu menetapkan prosedur, dan mengambil Tindakan atau kebijakan.

MEDIA MONITORING DALAM SEKTOR PEMERINTAHAN

Untuk dapat menggagas pesan kunci yang sesuai dengan pikiran audiens, diperlukan alat yang dapat diandalkan untuk mengetahui apa yang tengah berkembang di masyarakat salah satunya menyusun Media monitoring, yang merupakan proses untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi konten media (seperti berita, artikel, sosial media, dan sebagainya) yang mencakup perusahaan, produk, atau merek tertentu. Hal ini penting bagi tenaga humas pemerintah karena memungkinkan instansi untuk mengetahui apa yang sedang dikatakan tentang mereka di dunia nyata dan di dunia maya, serta membuat keputusan yang tepat dalam menanggapi perkembangan tersebut. Untuk itu tenaga kehumasan harus mampu mengemas narasi serta kinerja melalui pesan

kunci yang tersusun baik, menjadi penting untuk menyeimbangkan dan membangun pemberitaan terkait organisasi pemerintah di ruang publik.

Melalui media monitoring, para pihak yang menangani masalah mengkonter pemberitaan negatif yang sedang marak di suatu organisasi pemerintahan diharapkan dapat diantisipasi dengan mengumpulkan seluruh informasi yang penting dalam proses pembuatan pesan kunci. Setelah itu, Ira merekomendasikan agar dilakukan mitigasi isu sebagai persiapan. Tanpa mitigasi, jangan berani hadapi media. Pertama yang harus dilakukan tenaga humas adalah melakukan mitigasi pada saat, merespon berita yang muncul? *'What If' scenario* sangat penting. Dalam pelaksanaan mitigasi ini, *urgensi* Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan komunikasi kehumasan harus dapat memberikan panduan terkait isu-isu sekaligus dengan pesan kuncinya dengan menyampaikan pesan program-program unggulan dengan angle pemberitaan yang dapat diterima oleh publik.

Peran media monitoring dalam sektor pemerintahan

Banyak sekali aspek yang dapat dimanfaatkan dan dilakukan dengan menggunakan sistem media monitoring, dalam hal ini mengenai lingkup pemerintahan, diantaranya yakni :

- **Mengukur sentiment publik**

Pemantauan dan analisis media berbasis isu dapat membantu institusi pemerintah menentukan isu spesifik mana yang harus diprioritaskan menurut opini publik. Isu-isu penting dalam media sosial maupun media massa memiliki beragam nada dari mulai positif, netral hingga negatif yang memungkinkan dapat menggiring opini

publik. Oleh karenanya, isu-isu real time harus dipantau secara berkala, sehingga tenaga kehumasana dapat menyusun strategi komunikasi dan rencana untuk meredam isu yang keliru jika didapati pemberitaan yang tidak sesuai dengan fakta.

- **Meningkatkan respon pemerintah terhadap isu sosial**

Dengan menggunakan media monitoring, pemerintah dapat mengukur apakah pesan yang dikomunikasikan telah sampai pada publik dan dampak pesan tersebut serta mengevaluasi efektivitas rencana komunikasi dan kampanye. Data dan informasi yang dikumpulkan dapat digunakan pemerintah untuk memperbaiki reputasi kurang baik yang tumbuh di masyarakat demi meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Selain itu, juga bisa menjadi bahan acuan dalam meningkatkan program dengan menganalisis penerimaan positif dan negatif terhadap pesan pemerintah.

- **Membuat kebijakan berdasarkan data dari media monitoring**

Instansi pemerintah dapat mengambil informasi dan data yang diperoleh dari pelaksanaan media monitoring dan menggunakannya untuk membuat berbagai strategi seperti strategi komunikasi dan strategi anggaran yang terinformasi di periode berikutnya

- **Mengelola krisis dengan media monitoring**

Melakukan pemantauan dan analisis media, memungkinkan instansi

pemerintah dapat membuat strategi potensi dalam mengelola risiko. Hal ini tentunya bermanfaat untuk manajemen risiko pada suatu permasalahan yang akan terjadi.

Tantangan media monitoring yang dihadapi pemerintah

Beberapa tantangan menggunakan media monitoring yang akan dihadapi pemerintah antara lain terkait pengelolaan volume data yang besar, analisis yang akurat, keamanan data, dan ketergantungan pada teknologi. Tantangan-tantangan ini dapat diatasi dengan baik apabila pemerintah memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dengan tepat.

- **Volume Data yang Besar**

Tantangan pertama yang kerap dihadapi pemerintah ketika mulai menggunakan media monitoring adalah ketika mengelola data dengan volume yang sangat besar. Hal ini terjadi karena media monitoring sering kali melibatkan pengumpulan data dari berbagai macam sumber. Antara lain seperti data unggahan warganet di linimasa media sosial, entri berita online, hingga blog atau laman website spesifik. Mengelola dan menganalisis volume data yang besar ini dapat menjadi tantangan teknis dan memerlukan sumber daya yang signifikan. Berbeda dengan volume data yang biasanya diolah pemerintah yang didapat dari analisis dengan sumber-sumber konvensional. Pemerintah sebaiknya meng-upgrade kompetensi ASN atau bekerjasama dengan pihak ketiga untuk hal ini.

- **Analisis yang Akurat**

Membuat analisis yang akurat dari data media bagi pemerintah bisa menjadi

sulit karena berbagai faktor. Dengan faktor utama, seperti point pertama, yaitu kompetensi sdm. Sedangkan faktor-faktor lain seperti bias media, interpretasi yang berbeda terhadap konten, dan sentimen yang berubah-ubah. Terdapat sejumlah kompetensi analisis media monitoring yang harus dimiliki penanggung jawab seperti kompetensi teknis guna mengumpulkan data yang tersebar secara acak dari dalam internet. Selain itu kemampuan menyaring informasi yang relevan dan valid juga merupakan tantangan penting.

- **Keamanan Data dan Privasi**

Pemantauan media sosial menimbulkan kekhawatiran privasi yang signifikan, terutama jika melibatkan pelacakan pengguna individu atau informasi sensitif. Pemerintah harus menyeimbangkan kebutuhan pemantauan dengan penghormatan terhadap hak privasi warga negara. Dalam proses pengumpulan dan analisis data, pemerintah harus memastikan keamanan data dan melindungi informasi pribadi. Kebocoran data atau penggunaan yang tidak sah bisa menimbulkan masalah besar bagi kepercayaan publik.

- **Ketergantungan pada Teknologi**

Teknologi dan media monitoring adalah suatu keniscayaan. Semakin maju teknologi untuk memantau media, maka hasil media monitoring akan semakin maju juga. Akan tetapi, hanya mengandalkan teknologi untuk memantau media bisa menyebabkan ketergantungan yang berlebihan pada algoritma dan sistem otomatis, yang mungkin tidak selalu memahami konteks atau nuansa lokal dan budaya dalam informasi yang dipantau

Manfaat Layanan Media Monitoring bagi Pemerintah

Sebelum penjelasan yang lebih detail terkait urgensi media monitoring bagi pemerintah, kita simak dulu apa saja manfaat yang bisa diambil. Pemanfaat media monitoring bagi pemerintah mungkin tidak banyak berbeda dengan lembaga lain seperti bisnis atau akademik. Akan tetapi hal-hal ini akan sangat krusial jika pemerintah ingin mendapatkan hasil yang maksimal saat menggunakan media monitoring.

- **Memahami Pandangan Masyarakat**

Memeriksa pandangan masyarakat secara mendalam sangat penting untuk memahami persepsi publik. Ditengah volume perbincangan masyarakat yang sangat masif di media sosial, menemukan persepsi yang sederhana menjadi tantangan tersendiri.

- **Memberi Awareness**

Memberikan kesadaran kepada pemangku kepentingan dalam momen penting, terutama selama proses pengambilan kebijakan, merupakan manfaat khusus media monitoring bagi pemerintah. Nuansa yang terjadi bisa sangat kompleks sehingga perlu cara meminimalkan resistensi dan memastikan transparansi dalam proses tersebut.

- **Mengawasi Jalannya Program**

Mengawasi pelaksanaan program secara teliti, termasuk campaign media pada periode tertentu. Respons publik kerap membanjiri media dan diperlukan ketelitian untuk memilah-milah supaya strategi komunikasi berjalan sesuai rencana dan target tercapai dengan efektif.

- **Menjadi Tanggung Jawab Politik**
Kebijakan yang telah ditetapkan menjadi tanggung jawab politik untuk dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui mekanisme akuntabilitas yang transparan dan konsisten. Pemerintah harus memastikan bahwa publik terinformasi dengan baik untuk setiap kebijakan yang diambil.
- **Merespon Isu Sesuai Target**
Mengumpulkan informasi tentang isu tertentu melalui liputan media massa membantu memastikan bahwa respons yang diberikan relevan, cepat, dan sesuai dengan kebutuhan target audiens. Terkadang isu yang penting malah tersembunyi di tengah-tengah riuhnya media.
- **Mitigasi Manajemen Risiko**
Media sosial menjadi alat strategis dalam mitigasi risiko dengan memantau percakapan publik, mendeteksi potensi krisis, dan merancang langkah pencegahan secara proaktif. Sama seperti di luar, krisis di media juga memiliki tanda-tanda awal yang perlu dikelola sebelum menjadi masalah besar di kemudian hari.

SIMPULAN

Media monitoring merupakan alat yang sangat penting untuk mengelola reputasi, mengidentifikasi tren, dan membuat keputusan yang tepat. Manfaat yang ditawarkannya sangat banyak, mulai dari membantu organisasi mengelola krisis secara efektif, melindungi reputasi, memahami persepsi publik, hingga mengidentifikasi peluang. Dengan memanfaatkan media monitoring secara efektif, organisasi dan individu dapat memperoleh wawasan berharga yang dapat

digunakan untuk meningkatkan reputasi, mengelola risiko, dan mencapai tujuan mereka. Investasi dalam media monitoring adalah investasi untuk masa depan, karena dapat membantu organisasi dan individu tetap terdepan dalam lanskap media yang terus berubah.

DAFTAR PUSTAKA

1. <https://ivosights.com/read/artikel/media-monitoring-tools-peran-untuk-pelayanan-publik>
2. <https://analysis.netray.id/pentingnya-media-monitoring-bagi-pemerintahan/>
3. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/21511/Urgensi-Pesan-Kunci-Media-Monitoring-dan-Mitigasi-Isu-untuk-Jaga-Efektivitas-Komunikasi-Organisasi.html>
4. <https://blog.kazee.id/peran-media-monitoring-bagi-institusi-pemerintahan/>



Foto: Istimewa Dok Biro Pers Istana.

Irjen Mentan Amran Terpilih Sebagai Ketua KPK

JAKARTA — Pemilihan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2024–2029 usai digelar Komisi III DPR, Kamis (21/11/2024). Pemilihan dilakukan DPR dan hasilnya adalah Komjen Pol Setyo Budiyanto terpilih jadi Ketua KPK yang baru.

Diketahui, Komjen Pol Setyo Budiyanto saat ini menjabat sebagai Inspektur Jenderal (Irjen) pada Kementerian Pertanian di bawah komando Andi Amran Sulaiman. Budiyanto

lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 29 Juni 1967. Ia memiliki istri yang bernama Henny Setyo. Komjen Pol. Setyo merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akp) tahun 1989. Pria berusia 57 tahun itu memiliki segudang pengalaman di bidang reserse.

Di lembaga antirasuah ini, nama Komjen Setyo tidak asing lagi. Ia tercatat pernah menjabat sebagai Koordinator Supervisi Penindakan (Korsupdak) di Deputy Penindakan KPK.

Kemudian, pada tahun 2021, ia ditunjuk menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Setahun berselang, Irjen Setyo menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Utara. Setelah itu, ia menerima amanah sebagai Pati Itwasum Polri. Dan sejak 22 Maret 2024, ia mengemban amanat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian RI.

Kegigihan dan pengalamannya dalam pemberantasan korupsi menjadikan Mentan Amran kepincut pada sosok Komjen Setyo. Diketahui sejak Andi Amran terpilih sebagai Mentan, salah satu program prioritasnya adalah membersihkan kementerian yang dipimpinnya dari aroma KKN. Ini terbukti dari beberapa gebrakan Mentan Amran

bersama Irjen Kementan Setyo bahu-membahu menggelar aksi 'bersih-bersih' di tubuh Kementerian Pertanian.

Berikut nama-nama Pimpinan KPK periode 2024-2029:

Ketua KPK Setyo Budiyanto, Wakil Ketua terdiri dari Fitro Rochyanto, Ibnu Basuki Widodo, Johanis Tanak dan Agus Jogo Pramono.

Sedangkan nama-nama Dewas KPK adalah Wisnu Baroto, Benny Mamoto, Gusrizal, Sumpeno dan Chisca Mirawati. Muhamad Rizky Pradila - Humas Itjen



Itjen Kementan dan Itjen TNI Angkatan Darat Tindaklanjuti Hasil Pengawasan untuk Wujudkan Swasembada Pangan

YOGYAKARTA - Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian bersama Inspektorat Jenderal TNI Angkatan Darat melakukan koordinasi terkait hasil pengawasan kegiatan optimalisasi lahan, irigasi perpompaan, irigasi perpipaan dan bantuan pompa tahun anggaran (TA) 2024.

Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tin Latifah mengatakan koordinasi dilakukan dalam upaya menyamakan persepsi atas kegiatan pengawasan yakni pemantauan, audit, maupun pengawasan lainnya terhadap pelaksanaan optimasi lahan.

“Jadi kita harus sama persepsinya terutama bagi pelaksana kegiatan sehingga apa yang menjadi kesimpulan berdasarkan hasil audit dapat ditindaklanjuti untuk diperbaiki,” kata Tin Latifah saat membuka kegiatan bertajuk ‘Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal atas Kegiatan Optimalisasi Lahan, Irigasi Perpompaan, Irigasi Perpipaan, dan Bantuan Pompa’ di Yogyakarta, pada Kamis, 21 November 2024.

Menurut Tin Latifah hasil pengawasan yang dilakukan antara Itjen Kementan dan Itjenad harus ditindaklanjuti agar tidak menjadi temuan yang berulang. Terlebih lanjut dia tantangan



Foto: Fitri Nurhasanah-Humas Itjenan

pengawasan tahun 2025 akan lebih berat mengingat program swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Ada dua strategi utama pemerintah dalam mencapai swasembada pangan tersebut pertama intensifikasi yakni memanfaatkan lahan secara optimal, misalnya dengan meningkatkan Indeks Pertanaman (IP). Kedua ekstentifikasi dengan membuka hutan untuk dijadikan lahan pertanian.

“Keberhasilan kegiatan 2025 tentu kita bisa potret dari pelaksanaan kegiatan 2024 ini karena di 2024 dengan target yang tidak terlalu banyak optimasi lahan hanya 350 ribu hektar ternyata tahun depan lebih banyak lagi (menjadi

1 juta hektar,” tuturnya. Oleh sebab itu Tin Latifah berharap kerja sama yang sudah dibangun antara Itjen Kementan dan Itjenad dapat terus berlanjut untuk memastikan pengawasan demi memastikan program swasembada pangan dapat dilaksanakan dengan efektif.

“Kementan itu tidak mungkin bisa dilaksanakan sendiri apalagi pengawasannya hanya dilakukan Itjen, untuk itu kami berharap untuk koordinasi yang kita lakukan bersama bisa berlanjut sehingga target swasembada pangan bisa terealisasi,” ucapnya. (Muhamad Rizky Pradila - Humas Itjen)



Program Pompanisasi Jawa Barat Lampaui Target Irjen Kementan: Kerja Bersama yang Patut Disyukuri

JAKARTA - Kementerian Pertanian melalui program modernisasi alat dan mesin pertanian (Alsintan) terus berupaya melakukan peningkatan produktivitas pertanian di seluruh Indonesia termasuk di Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan data Kementan, program pompanisasi di Provinsi Jawa Barat telah melampaui target yang berhasil mencapai 115.230 hektar

dari target awal sebesar 114.180 hektar atau setara dengan 100,91%. Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Pertanian (Kementan) Setyo Budiyanto mengatakan capaian target tersebut merupakan kerja keras semua pihak yang patut disyukuri. Hal ini menandakan optimalisasi dilaksanakan dengan baik dalam meningkatkan produktivitas pertanian.

“Kita patut syukri dan apresiasi kepada semua pihak yang telah bekerja keras dan bekerja sama untuk keberhasilan program modernisasi alsintan khususnya di Provisni Jawa Barat. Baik di level Kementerian, Pemerintah Provinsi, Perintah Kabupaten, para penyuluh dan juga para petani itu sendiri yang cukup antusias dalam memanfaatkan bantuan alsintan,” ujar Setyo dalam keterangannya dikutip, Senin, 16 September 2024.

Saat ini kata Setyo, data pemantauan alsintan yang disalurkan dan telah dimanfaatkan dengan baik, capainya sampai 85%. Adapun 15% yang belum dimanfaatkan akan dilakukan mitigasi sehingga dapat diambil langkah yang efektif. “Bila bantuan alsintan tidak dimanfaatkan karena kelompok sudah jenuh atau spesifikasi alsintan yang kurang sesuai, nanti dapat direlokasi pada kelompok yang lebih membutuhkan,” ujarnya.

Berdasarkan data Kementan, dari total 9.031 unit pompa yang diusulkan untuk Provinsi Jawa Barat, sebanyak 8.181 unit telah berhasil diterima. Unit tersebut didistribusikan ke berbagai pihak, dengan rincian 4.398 unit diterima oleh Poktan/Gapoktan/UPJA dan 3.783 unit disalurkan kepada Brigade TNI.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 6.922 unit telah dimanfaatkan secara efektif, dengan rincian 3.186 unit dimanfaatkan oleh Poktan/Gapoktan/UPJA dan 3.736 unit oleh Brigade TNI. Sementara itu, untuk program irigasi perpompaan, sebanyak 724 unit pompa beserta konstruksinya telah terealisasi, namun baru 217 unit yang telah dimanfaatkan secara optimal. Hal ini menjadi perhatian khusus untuk memaksimalkan manfaat pompa dalam mendukung aktivitas irigasi di sektor

pertanian.

“Ini menjadi catatan penting bagi kami, juga Direktorat Irigasi Peratanian. Penyebabnya tentu beragam, seperti debit air yang masih kurang, belum memasuki jadwal tanam sehingga pompa belum dimanfaatkan atau kendalateknis lainnya seperti terbatasnya bahan bakar atau pekerjaan konstruksi yang terkendala,” ucap Setyo yang juga Penanggungjawab (Pj) Satgas Antisipasi Darurat Pangan Provinsi Jawa Barat tersebut.

“Kami, dibantu dengan TNI/Polri dan Penyuluh Pertanian terus melakukan identifikasi dan menyelesaikan persoalan terkait dengan pemanfatan irigasi perpompaan. Juga terus berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) untuk mengidentifikasi saluran-saluran air yang bermasalah dan membuat skala prioritas untuk saluran yang dapat segera diperbaiki,” lanjutnya.

Adapun untuk kelompok tani penerima bantuan irigasi perpompaan yang konstruksinya telah selesai 100% namun mesin pompa belum diterima, Setyo menyarankan untuk dapat meminjam pompa dari brigade baik Kodim atau Dinas setempat sehingga irigasi pompa dapat segera dimanfaatkan sesuai dengan jadwal tanam masing-masing kelompok.

“Prinsipnya, jangan sampai ada kesempatan tanam terlewatkan begitu saja, hanya karena kendala teknis yang sebenarnya dapat diatasi,” tambahnya.

Kendala Luasan Padi Gogo

Setyo mengungkapkan, saat ini upaya perluasan padi gogo masih belum maksimal. Salah satu kendalanya adalah ketersediaan benih yang sangat terbatas. Selain itu, curah hujan belum merata belum mendukung untuk memulai tanam padi lahan kering.

“Namun demikian kami terus mendorong petani untuk dapat memanfaatkan momentum tanam sebaik mungkin, dengan menggunakan benih padi gogo lokal yang adaptif di wilayahnya. Kami juga terus berkoordinasi dengan Direktorat Perbenihan dalam rangka mengidentifikasi ketersediaan benih padi gogo dan melakukan upaya lainnya untuk mempercepat realisasi tanam,” ucapnya.

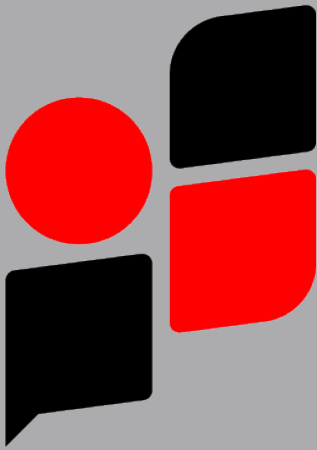
Setyo berujar bahwa persoalan pertanian tidak hanya dapat diselesaikan oleh Kementerian Pertanian saja melainkan semua pihak harus ikut terlibat. Dia pun berharap semua ikut turun dalam pembangunan pertanian termasuk masyarakat secara umum.

“Kepada semua pihak mari kita ambil peran masing-masing, agar kita bisa memanfaatkan dengan baik, bisa menjaga dan memelihara semua sarana dan prasarana yang pemerintah yang di distribusikan kepada petani. Swasembada pangan dan lumbung pangan dapat terealisasi dalam waktu yang tidak lama dan menjadi tanggung jawab kita bersama bahwa kebutuhan konsumsi seluruh masyarakat Indonesia yang berkisar 270 juta jiwa dapat terpenuhi dengan baik. Khusus bagi petani, yang menjadi ujung tombak pembangunan pertanian di Indonesia menjadi semakin sejahtera,” tuturnya. (Muhamad Rizky Pradila - Humas Itjen)





Foto: Muhamad Rizky - Humas Itjentan



HAKO

HARI ANTI KORUPSI

Teguhkan Komitmen Ber

Sekretaris Itjen Kementan Ingatkan Semangat Memerangi Korupsi Secara Kontinyu

JAKARTA - Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Pertanian (Kementan) memperkuat komitmennya dalam upaya pemberantasan korupsi dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) yang jatuh pada 9 Desember 2024.

Sekretaris Itjen Kementan Tin Latifah menegaskan korupsi sebagai musuh bersama harus dihadapi dengan bekerja bersama sehingga tidak dapat tumbuh. Dengan upaya tersebut harapannya program swasembada pangan Kementerian Pertanian dapat berjalan dengan maksimal.

“Kita komitmen bersama-sama untuk memerangi korupsi, bukan saja dijaga

melainkan harus terus menerus kita laksanakan kita tingkatkan (upaya pemberantasan) agar Kementan ini terbebas dari korupsi,” ujar Tin Latifah saat membuka acara peringatan Hakordia di Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian pada Selasa, 10 Desember 2024.

Dalam kesempatan itu Tin juga meminta kepada jajarannya di Itjen khususnya kepada para auditor untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik serta menjadi contoh dengan menjunjung tinggi nilai-nilai anti korupsi. “Terutama kepada para auditor agar memperkuat pengawasan dengan menjalankan fungsi *advisory* dan konsultasi dan menjaga *quality assurance* secara optimal,” tuturnya.

KORDIA

RUPSI SEDUNIA 2024

tantas Korupsi untuk Indonesia Maju



Foto: Fitri Nurhasanah-Humas Itjenan

Sebagai informasi, Kementerian Pertanian menggelar peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2024 selama empat hari pada Selasa 10 sampai dengan Jumat 13 Desember 2024.

Adapun rangkaian kegiatan Hakordia kali ini diisi dengan sejumlah perlombaan pada hari pertama mulai dari pembacaan puisi hingga stand up comedy. Selain itu Kementan juga melaksanakan diskusi tentang bimbingan teknis pengaduan masyarakat (Dumas) pada hari kedua dan ketiga.

Puncak acara Hakordia ini akan melaksanakan senam bersama dan diikuti oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. (Muhamad Rizky Pradila - Humas Itjen).



Foto: Fitri Nurhasanah-Humas Itjentan

Dukung Program Ketahanan Pangan, Kementan Beri Bantuan Alat dan Benih Pertanian ke Polda Banten

JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) memberikan bantuan peralatan dan benih pertanian kepada Polda Banten guna mendukung program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) yang selaras dengan upaya penguatan ketahanan pangan.

Bantuan tersebut berupa 2 unit mesin combine harvester Maxxi 102, 10 unit mesin hand tractor Quick G3000 Zeva, 64.875 kg benih jagung jenis maxi untuk 4.352 hektare, dan cabai 360 pak untuk 30 hektare.

Inspektur Jenderal (Irjen) Kementan, Setyo Budiyanto, berharap bantuan tersebut dapat

digunakan secara maksimal untuk masyarakat di bawah program Poliran, yaitu program Polri untuk memberdayakan masyarakat pengangguran dengan pelatihan kerja dan peningkatan keterampilan.

“Ini merupakan kebanggaan khususnya bagi Kementan bahwa Polda Banten yang memiliki tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat tetapi memiliki program-program yang berhubungan dengan masalah pertanian,” kata Setyo setelah menyerahkan bantuan kepada Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Ario Setio, pada Rabu (23/10/2024).

Menurut Setyo, upaya menjaga ketahanan pangan tersebut juga sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pertanian (Mentan) Amran yang menjadikan swasembada pangan sebagai prioritas utama dalam kepemimpinannya. “Mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan Polda Banten ini bisa menyejahterakan masyarakat,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kapolda Banten Irjen Pol Suyudi menjelaskan bantuan dari Kementan merupakan langkah nyata pemerintah mendukung ketahanan pangan nasional, khususnya di wilayah Provinsi Banten.

“Ketahanan pangan adalah salah satu pilar penting yang menjamin stabilitas sosial dan

ekonomi bangsa. Polri melalui Polda Banten tidak hanya bertugas menjaga stabilitas keamanan, tetapi juga berperan aktif dalam berbagai kegiatan yang mendukung kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.

Sebelumnya, Mentan Amran mendukung penuh arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pencapaian swasembada pangan. Ia optimistis dapat mewujudkan hal tersebut dalam empat tahun.

“Ini gagasan besar Bapak Presiden, sehingga seluruh pihak terkait harus bersama-sama berkolaborasi untuk mencapai mimpi besar itu. Kami akan berupaya keras mencapai target itu empat tahun, bila perlu sebelum empat tahun,” ujarnya. (Muhamad Rizky Pradila - Humas Itjen)



Foto: Fitri Nurhasanah-Humas Itjenan



Foto: Fitri Nurhasanah-Humas Itjen

Itjen Kementan Raih Dua Penghargaan PPID Kategori Badan Publik Informatif dan Komitmen Pimpinan Terbaik

JAKARTA - Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian meraih dua penghargaan dalam ajang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Penghargaan ini diserahkan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono dalam acara Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang diselenggarakan di Bogor, pada 6 Desember 2024.

Dua penghargaan yang diraih Itjen masing-masing kategori Badan Publik Informatif 2024

dan penghargaan khusus Komitmen Pimpinan Terbaik. Kedua penghargaan itu diterima langsung oleh Sekretaris Itjen Kementan Tin Latifah.

Dalam sambutannya Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono menyampaikan bahwa keterbukaan informasi sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi oleh badan publik. Oleh sebab itu setiap badan publik harus mampu memenuhi kebutuhan tersebut. "Rakyatnya butuh atau

enggak butuh anda harus menyediakan informasinya dulu,” kata Sudaryono saat memeberikan sambutan.

Sudaryono pun meminta agar semua pihak dapat saling bahu-membahu bekerja sama dalam mendukung kebutuhan informasi publik. Dengan begitu kepercayaan publik kepada Kementerian Pertanian dapat terbangun dengan baik.

Lebih jauh Sudaryono berharap agar selalu meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik. Pelayanan itu dapat dimulai dari perbaikan terhadap diri sendiri. “Mari kita sebelum kita sukses swasembada perbaiki pribadi kita masing-masing,” tuturnya.

Sementara itu terpisah, Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Setyo Budianto menyampaikan terimakasih atas penghargaan yang diberikan. “Saya ucapkan terimakasih penghargaan ini sangat bermakna, dan pencapaian ini hasil kerja keras bersama dari super tim seluruh pegawai yang ada di Itjen,” ucapnya.

“Saya berharap penghargaan ini dapat meningkatkan motivasi dan kinerja khususnya bagi pegawai yang ada di Itjen terutama dalam pengelolaan informasi publik yang manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat pertanian,” katanya. (Muhamad Rizky Pradila - Humas Itjen)



Foto: Fitri Nurhasanah-Humas Itjentan



Kementan - TNI AD Kerjasama Kawal Program Swasembada Pangan di 12 Provinsi

JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) menggandeng TNI Angkatan Darat (TNI AD) untuk mengawal dan mendampingi pelaksanaan optimasi lahan rawa (oplah) sebagai salah satu program swasembada pangan. Kerja sama strategis ini bertujuan untuk memastikan program swasembada pangan berjalan sesuai sasaran, efektif, dan sesuai aturan.

Inspektur Jenderal (Irjen) Kementan Setyo Budiyanto mengatakan pengawalan dan pendampingan tersebut dilakukan sebagai tindaklanjut arahan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman untuk memastikan agar kegiatan optimasi lahan rawa di daerah berjalan dengan optimal.

“Kita fokus pada arahan Mentan Amran untuk bisa melakukan pengawalan dan pendampingan terkait program yang dilaksanakan dapat tercapai dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Setyo.

Pada implementasinya di lapangan, Oplah turut melibatkan TNI AD. Babinsa bersama penyuluh pertanian bahu-membahu memberikan pendampingan kepada petani. Oleh karena itu, dalam pengawalan dan pendampingannya pun, Kementan bekerja sama TNI AD.

Program pengawalan dan pendampingan ini dilakukan di 12 provinsi lokasi oplah, meliputi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Papua Selatan.

Pengawalan terhadap program dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementan dan jajaran TNI AD melalui Inspektorat Jenderal Angkatan Darat (Itjenad) serta Inspektorat Kodam. Jika ada hambatan, masing-masing Tim Pengawalan Propinsi memberikan konsultasi untuk mengatasi masalah tersebut,” tutur Setyo.

Untuk tahun anggaran 2024, Kementan dan TNI AD telah melakukan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan pada 23-28 September 2024 lalu. Dari pelaporan yang disusun, Setyo menyebutkan pihaknya menemukan sejumlah kendala dan merekomendasikan kepada Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP) agar berkoordinasi dengan Kepala Dinas terkait. Kerjasama Kementan dan TNI AD dalam mewujudkan swasembada pangan

akan terus berlanjut. Rekomendasi hasil pengawalan dan evaluasi tahun anggaran 2024 akan menjadi pijakan penting dalam pelaksanaan program swasembada pangan di tahun 2025 dan seterusnya.

“Kami berharap masukan dari hasil evaluasi ini dapat memperbaiki implementasi program ke depan, sehingga target swasembada pangan dapat tercapai dengan maksimal,” ujar Setyo.

Sebagai informasi, Mentan Amran bergerak cepat mendorong ekstensifikasi dan intensifikasi lahan demi mewujudkan swasembada pangan Nasional. Hal itu juga sesuai dengan amanah Presiden Prabowo Subianto yang bercita-cita Indonesia berdaulat pangan.

Amran optimistis pihaknya mampu mencapai swasembada pangan dengan beberapa program seperti cetak sawah, mekanisasi, dan peningkatan kapasitas petani muda.

“Kami tak ingin hanya wacana kita harus bergerak cepat dan tepat agar masyarakat Indonesia dapat terus menikmati akses pangan yang mudah dan terjangkau,” terang Amran. (Muhamad Rizky Pradila - Humas Itjen)



Foto: Fitri Nurhasanah-Humas Itjentan

Sekretaris Itjentan Tin Latifah: Selamat Kepada Irjen Setyo Budianto Terpilih Sebagai Ketua KPK

Yogyakarta - Komisi III DPR RI resmi telah menetapkan Komjen Pol Setyo Budianto sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029.

Penetapan ini sesuai dengan hasil pemungutan suara atau voting usai merampungkan

uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap 10 calon pimpinan KPK.

Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, Tin Latifah mengucapkan selamat kepada Setyo Budianto yang memegang amanah baru sebagai Ketua KPK Periode 2024-2029.

Seperti diketahui, saat ini Komjen Pol Setyo Budianto juga menjabat sebagai Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Pertanian, dibawah komando Bapak Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

“Pak Irjen Setyo menyampaikan salam kepada kita semua disini. Saya tadi sudah menyampaikan selamat karena sudah terpilih sebagai Ketua KPK,” ujar Tin Latifah saat menyampaikan pidato perwakilan Irjen Kementan pada pembukaan kegiatan FGD Audit Optimasilisasi Lahan dan Irigasi Perpompaan Tahun 2024 di Yogyakarta pada Kamis, 21 November 2024.

Ses Itjentan Tin Latifah mengatakan turut berbahagia atas kabar baik tersebut, dan juga terharu dengan terpilihnya Irjen Setyo sebagai Ketua KPK.

“Saya terharu beliau (Irjen Setyo) sampaikan ke saya bahwa tidak akan lupa pada Itjen Kementan,” ucapnya.

Lebih lanjut Ses Itjentan Tin Latifah mendoakan dengan terpilihnya Irjen Setyo Budianto sebagai Ketua KPK dapat memberikan kontribusi terbaik bagi negara.

“Semoga Pak Irjen Setyo dapat mengemban amanah yang besar ini dengan baik. Saya selalu mendoakan Beliau agar mendapat kemudahan, kekuatan, dan kesehatan dalam menjalankan tugas sebagai Ketua KPK, dan jangan lupakan Itjen Kementan ya pak,” ucapnya.

Setyo lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 29 Juni 1967. Beliau memiliki istri yang

bernama Henny Setyo. Komjen Pol. Setyo merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akp) tahun 1989. Pria berusia 57 tahun itu memiliki segudang pengalaman.

Setyo pernah menjadi Kapolres Biak Numfor, Wadirreskrim Polda Papua hingga Dirkrimsus Polda Papua. Setyo juga pernah menjabat sebagai Kapolda, diantaranya Kapolda Sulawesi Utara dan Kapolda Nusa Tenggara Timur.

Di lembaga antirasuah ini, nama Komjen Setyo tidak asing lagi, ia pernah menjabat sebagai Direktur Penyidikan KPK selama lebih dari satu tahun pada 2020. Sebelum itu, menjabat sebagai Koordinator Wilayah III KPK sekaligus Pelaksana Tugas Dirdik KPK.

Kemudian, pada tahun 2021, Setyo ditunjuk menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Setahun berselang, Irjen Setyo menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Utara. Setelah itu, ia menerima amanah sebagai Pati Itwasum Polri. Dan sejak 22 Maret 2024, mengemban amanat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian RI.

Kegigihan dan pengalamannya dalam pemberantasan korupsi menjadikan Mentan Amran kepincut pada sosok Komjen Setyo. Salah satu program prioritasnya adalah membersihkan kementerian yang dipimpinnya dari aroma KKN.

Ini terbukti dari beberapa gebrakan Mentan Amran bersama Irjen Kementan Setyo bahu-membahu menggelar aksi ‘bersih-bersih’ di tubuh Kementerian Pertanian.

(Muhamad Rizky Pradila - Humas Itjen)



Menuju Amanah yang Mulia

Inspektorat III

Persembahan Inspektorat III Itjen Kementan kepada Bapak Irjen Kementan “Komjen Setyo Budiyanto”

**Hari ini langkahmu beranjak pergi,
Namun bukan untuk mengakhiri.**

**Kau tinggalkan tempat ini dengan harapan,
Melanjutkan perjuangan demi keadilan.**

**Kami bangga pada keberanianmu,
Melangkah ke medan dengan tantangan baru.**

**Sebagai pemimpin, kau telah membuktikan,
Bahwa amanah adalah panggilan.**

**Kini, tanggung jawab lebih besar menanti,
Menjaga bangsa dari kezaliman yang pasti.**

**Menjadi Ketua KPK, penjaga integritas,
Mengurai simpul korupsi yang membekas.**

**Meski berat, kami percaya padamu,
Tekadmu baja, nuranimu tak akan layu.**

**Setiap langkah yang kau ambil nanti,
Akan menjadi harapan negeri ini.**

**Selamat bertugas di tempat yang baru,
Doa kami menyertai setiap waktu.**

**Jadilah cahaya di tengah kelam,
Penegak keadilan yang tak pernah padam.
(Suhardi)**

PENTINGNYA MENTAL HEALTH AWARENESS DI LINGKUNGAN KERJA

Oleh : Indrastari Sintia Laksmi
Pranata Humas Itjen

Kesehatan mental di lingkungan kerja telah menjadi topik yang semakin diperhatikan dalam beberapa tahun terakhir. Dengan meningkatnya tuntutan dunia kerja, banyak pegawai menghadapi stres, kecemasan, dan tantangan psikologis lain yang mempengaruhi kesejahteraan dan kinerja mereka. Masalah kesehatan mental dapat sangat memengaruhi kemampuan seseorang untuk melakukan kinerja yang baik. Untuk itu, diperlukan mental health awareness atau kesadaran kesehatan mental di lingkungan kerja.

Lingkungan kerja yang penuh tekanan akan membuat pekerja tidak memiliki kesejahteraan psikologis yang optimal. Hal ini tentunya dapat menyebabkan pekerja mengalami stres yang tinggi dan burnout. Tingkat stres yang tinggi dikhawatirkan dapat memengaruhi kesejahteraan keluarga, yang ujung-ujungnya mempengaruhi ketahanan keluarga pekerja. Menciptakan budaya kesadaran kesehatan mental di tempat kerja sangatlah diharuskan.

Hal ini tidak hanya mendukung individu yang mengalami kesulitan, tetapi juga berkontribusi terhadap lingkungan kerja yang lebih positif dan produktif bagi semua orang. Selain itu, kurangnya kesadaran akan kesehatan mental, akan menimbulkan budaya kerja yang negatif, seperti menumbuhkan rasa takut pegawai yang ingin bercerita tentang kesehatan mental mereka karena takut perjalanan kariernya terganggu.

Kesehatan mental yang baik adalah elemen penting untuk produktivitas dan kesejahteraan pegawai. Pegawai yang sehat secara mental lebih cenderung terlibat, termotivasi, dan mampu berkontribusi secara optimal bagi perusahaan. Sebaliknya, gangguan kesehatan mental, seperti stres, depresi, atau kecemasan, dapat berdampak buruk pada performa kerja dan produktivitas pegawai. *Mental Health First Aid* merupakan salah satu penanganan paling dini untuk membantu orang-orang di sekitar kita yang mengalami masalah terkait gangguan kesehatan mental. *Mental Health First Aid* juga



menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan pengetahuan mengenai kesehatan mental dan meningkatkan perilaku mendukung terhadap individu dengan masalah kesehatan mental. Ada beberapa gangguan kesehatan jiwa seperti: depresi, psikotik, penyalahgunaan obat, gangguan makan, dan demensia. Serta kondisi krisis kesehatan jiwa seperti: risiko bunuh diri, mencederai diri, serangan panik, atau pengalaman yang menimbulkan trauma.

Mental Health First Aid memberikan setiap individu keterampilan dan Rencana Tindakan, sehingga tahu apa yang harus dilakukan dalam setiap situasi. Rencana Tindakan *Mental Health First Aid* tersebut dikenal dengan ALGEE, merupakan rencana tindakan langkah demi langkah yang digunakan saat memberikan dukungan kepada seseorang yang mengalami situasi yang tidak menyenangkan.

A – Approach, nilai risiko bunuh diri atau bahaya. Cobalah untuk menemukan waktu atau tempat yang cocok untuk memulai

percakapan dengan orang tersebut, dengan tetap menjaga privasi dan kerahasiaan mereka. Jika orang tersebut tidak ingin menceritakan kepada Anda, dorong mereka untuk berbicara dengan seseorang yang mereka percayai.

L – Listen non judgmentally. Banyak orang yang mengalami tantangan atau kesusahan apabila ingin didengar terlebih dahulu, jadi biarkan orang itu berbagi tanpa mengganggu mereka. Cobalah untuk memiliki empati terhadap situasi mereka.

G – Give reassurance and information. Setelah seseorang berbagi pengalaman dan emosinya dengan Anda, bersiaplah untuk memberikan harapan dan fakta yang bermanfaat.

E – Encourage appropriate professional help. Semakin dini seseorang mendapat bantuan, semakin baik peluang mereka untuk sembuh. Jadi, penting untuk menawarkan bantuan kepada orang ini untuk mempelajari lebih lanjut tentang opsi yang tersedia bagi mereka.

INFO KESEHATAN

E – *Encourage self-help and other support strategies*. Ini termasuk membantu mereka mengidentifikasi hubungan jaringan dukungan mereka, program dalam komunitas, dan membuat rencana perawatan emosional diri dan fisik yang dipersonalisasi.

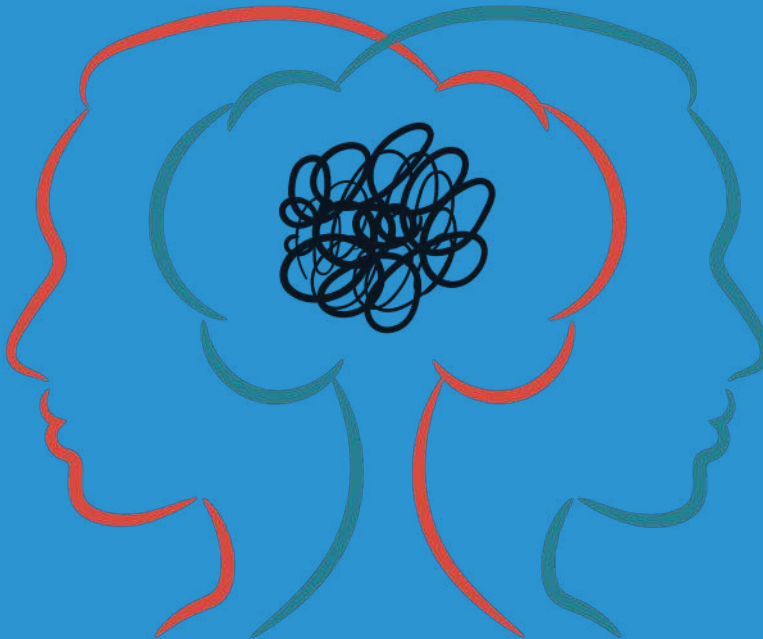
Untuk dapat menghindari hal tersebut diperlukan lima pilar yang dapat menciptakan lingkungan kerja yang sehat secara psikologis antara lain :

- **Kepemimpinan yang suportif**
Kepimpinan yang suportif berarti sejauh mana para pemimpin mengerti kebutuhan-kebutuhan pegawai dan menyediakan sebuah lingkungan yang **m e m i c u** keterlibatan pegawai, pengembangan dan dukungan.

- **Kejelasan peran**
Kejelasan peran berarti sejauh mana pegawai memiliki “*sense of purpose*” dan mengetahui apa yang diharapkan dari mereka. Hal ini akan membantu pegawai untuk bekerja sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan.

- **Keterlibatan Pegawai**
Keterlibatan pegawai berarti sejauh mana pegawai berkolaborasi, berbagi ide-ide dan mengatasi persoalan bersama, menuju ke pemahaman bersama dan satu tujuan.

- **Pengembangan dan Pertumbuhan**
Pengembangan dan pertumbuhan berarti sejauh mana organisasi menghargai usaha pegawainya dan menyediakan pembelajaran yang sesuai serta kesempatan untuk berkembang,



BE KIND TO YOUR MIND

- **Antusiasme**

Elemen emosional pegawai ketika berada di tempat kerja, seperti motivasi dan komitmen mereka, termasuk antusiasme individu dan kerja tim.

Pemimpin memainkan suatu peran dalam mendorong perubahan ini dengan memberikan contoh perilaku positif, memberikan dukungan, dan menjadikan kesehatan mental sebagai prioritas. Dengan melakukan hal ini, mereka dapat menciptakan lingkungan karyawan merasa dihargai dan didukung, sehingga menghasilkan tenaga kerja yang lebih tangguh dan produktif. (Indrastari- Humas Itjen)

DAFTAR PUSTAKA

1. <https://www.beritasatu.com/lifestyle/2817278/5-alasan-pentingnya-mental-health-awareness-di-lingkungan-kerja>
2. <https://www.gaji.id/id/2024/10/22/perlunya-mental-health-awareness-di-lingkungan-kerja/>

JAWARA PUISI HAKORDIA 2024

MALAIKAT PENCATAT TAK TINGGAL DIAM

Oleh: Cantika Putri A.

Ingatkah kawan ?
Hembusan nafas kita bagaikan neraca
Terlukis rona kesucian dan kegelapan
Merekam dosa dan pahala tanpa cela

Malaikat pencatat amal selalu berjaga
Mengukir setiap langkah dengan seksama
Mencatat nafsu yang merenggut hak
Dan ketamakan yang menjelma durjana

Ayolah kawan
Buktikan pada Sang Pencipta
Bahwa kuasa adalah amanah suci
Tanpa korupsi yang mengoyak nurani
Tanpa kolusi yang menutup mata hati
Dan tanpa nepotisme yang membangun dinasti

Setiap koin yang kau rampas
Adalah darah mereka yang lapar
Setiap janji yang kau khianati
Adalah tangisan dari bumi pertiwi

Apakah hati kita telah berkarat?
Tertutup dinding kemewahan yang tebal
Atau nurani kita yang telah mati
Hanyut dalam jerat keserakahan abadi

Demi raport hijau malaikat Raqib
Demi keadilan yang hakiki
Demi Tanah Air yang suci
Mari buang gelap yang mencemari

Keadilan mungkin diam untuk sesaat
Namun ingatlah, tanah ini merekam
Setiap langkah dalam gelap dan terang
Hingga kebenaran berdiri tegak menghakimi

Jakarta, 10 Desember 2024

RACUN ITU BERNAMA KORUPSI

Oleh: Fidayati Ulfah

Begitu nikmat, lezat kau rasakan
Tanpa kau sadari
Racunmu meresap, menusuk dan melukai kami
Nikmatmu membawa petaka bagi kami

Kau yang tertawa, kau yang bahagia
Kau merayakan suka cita...
Tapi lihatlah kami yang terluka
Kami yang tersiksa tanpa suara

Mungkin kau lupa
Mobil yang kau pakai
Uang yang kau hamburkan
Bahkan segala kemewahan yang kau rasakan
Berasal dari tetesan keringat kami

Bagimu seribu rupiah tak berarti
Tapi bagi kami, dengan seribu rupiah
Kami bisa memberi makan anak-anak kami yang lapar penuh harapan

Nikmati saja racunmu
Nikmati kebahagiaan semumu
Tetapi ingatlah, Tuhan tidak pernah diam
Melaikatnya mencatat setiap kelam

Tuhan Maha Adil
Karmanya pasti mengalir
Cepat atau lambat, waktu yang akan berbicara

Lihatlah ke depan, saat hari penghakiman tiba
Semua yang kau ambil, akan kembali menyiksa
Tak ada jalan keluar dari kehancuran
Korupsi hanya akan meninggalkan kehampaan

SAJAK BROKER BANPEM

Oleh: Muhammad Ridho Gunawan - Ditjen PSP

Hei Pak Tani... hehehehe
Sudahlah, web e-katalog itu tidak usah kau pandang-pandangi
Urusan TKDN, harga satuan, spesifikasi?
Apa memang kau benar mengerti ?
Sudahlah... untuk itu aku ada disini

Bapak butuh apa ?
Traktor roda 4, roda 2, rotavator? roda yang capung-capung buat rawa ?
Semua ada

Bapak butuh apalagi ?
Pompa 3inchi, 4 inchi, 6 inchi?
Tinggal nyengir saja, itu jadi
Combine Harvester? Power Thresher? Drum Seeder?
Orang-orang sudah mengenalku, "Sang Broker"

Yang penting, bapak isi dulu daftar penerimaan calon
Point-point dulu itu poligon
Atau minta ke bapak-bapak penyuluh di kebon
Nanti ku kasihlah uang, walaupun beli air galon
Mueheheheheh

Kenapa aku bisa tahu?
Kau jangan sembarangan dulu, aku juga sama sepertimu
Aku seorang petani dari desa yang kumuh
Tiap hari pergi ke ladang dengan bapakku
Menunggu 4 bulan hanya agar aku isa membeli buku
Berapa kali aku minta buat kuliah, dan jawaban ibunya:
"Mimpi jangan tinggi-tinggi nduk"

Sudahlah pak, memang petani itu tujuannya untuk dihantam
Disuruh tanam sepanjang musim tanam,
Diatur-atur apa yang aku tanam
Kemarau pun masih kau paksa, padahal biasanya mandi pun aku enggan
Diatur-atur jarak tanamku, diatur-atur berapa dosis pupukku
Tapi saat panenku jatuh, harganya melambung runyam
Kemana kalian setelahnya?
Siapa-siapa sekarang?
Dasar lancung!

Lalu aku pun berpikir
Dari mana pupuknya? dari mana benihnya? dari mana airnya?
Ternyata bantuan ini solusinya
Tidak berfikir panjang, aku *switching career*

Aku ikut si boss ke Jakarta
Meninggalkan anak-anakku dan istriku yang cantik
Ku jual sawah-sawahku tadi kepada developer rumah
Berharap modalku berlipat ganda

Yah begitulah,
lagi pula, kalau kata WS Rendra, dia bilang dia punya teman, pencopet kepada pacarnya
di “Masyarakat maling” kehormatan cuma gincu
Yang utama kelicinan
Nomor dua keberanian
Nomor tiga keuletan
Nomor empat ketegasan, biarpun dalam berdusta

Inilah ilmu hidup masyarakat maling
Jadi janganlah ragu-ragu
Rakyat kecil seperti kita tak bisa ngalah melulu

Tapi, itu duluuu...
Dengar-dengar,
Orang-orang di perempatan Ragunan itu sudah berubah
Mereka jaga whistleblowernya
Mereka buat itu Wilayah Bebas Korupsi
Mereka buat itu Dumas (Pengaduan Masyarakat) apalah itu
Semboyan itu bukan sembarang semboyan
Bisa juga ternyata mereka serius

Terakhir gara-gara aplikasi SI INTAN...
Bosku pun jadi korban
Masuk ia bolak balik kejaksaan
Aku ? Yang lain? Pontang-panting tidak karuan
Aku kapok pak, sungguh
Sudah keluar seluruh peluh, tapi dapat cuma gak sampe sepuluh

Pada akhirnya.. Walaupun kita orang susah pak, orang ga ada
Tapi rasanya menjadi petani memang untuk surga
Tentu dengan cara-cara yang mulia
Cukuplah aku sebagai nestapa

Saya akan kembali
Ke kampung halaman saya
Sebagai rakyat biasa
Membersihkan yang masih bisa tersisa



*Bergerak Bertindak
untuk Kinerja
dan Produktivitas
Lebih Baik*

KANAL PENGADUAN RESMI KEMENTERIAN PERTANIAN

CARA CEPAT LAPOR PENGADUAN MELALUI :



KALDU EMAS

Merupakan sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, sumbang pikiran, dan sarana perbaikan, bagi peningkatan kualitas Kementerian Pertanian

[HTTPS://DUMAS.PERTANIAN.GO.ID/](https://DUMAS.PERTANIAN.GO.ID/)



WHISTLEBLOWER'S SYSTEM

Merupakan fasilitas yang dapat digunakan oleh seorang whistleblower yang ingin melaporkan indikasi tindak pidana korupsi, tapi merasa sungkan atau takut identitasnya terungkap (dirahasiakan)

[HTTPS://WBS.PERTANIAN.GO.ID/](https://WBS.PERTANIAN.GO.ID/)



SI-INTAN

Merupakan Saluran komunikasi bagi pegawai untuk memberikan masukan, tanggapan, dan/atau pengaduan terhadap pelanggaran etik, gratifikasi, pelayanan publik dan pelaksanaan program Kementerian Pertanian

 **0811-1212-2023**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

*Kepedulian Anda
Menyelamatkan Indonesia*

”

Tema ini diarahkan untuk memberikan ruang, ide dan gagasan yang konstruktif terhadap upaya Inspektorat Jenderal sebagai garda terdepan dalam menjaga profesionalisme dan integritas Kementerian Pertanian untuk terwujudnya swasembada pangan menuju lumbung pangan dunia 2045

